



“Pemerintah Harus Bisa Menghentikan”

Kekerasan Sektarian dan Pelanggaran Lain
di Negara Bagian Arakan

Copyright © 2012 Human Rights Watch

All rights reserved.

Printed in the United States of America

ISBN: 1-56432-929-1

Desain sampul oleh Rafael Jimenez

Human Rights Watch berjuang untuk membela hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami berdiri dengan para korban dan aktivis yang mencegah diskriminasi, menegakkan kebebasan politik, melindungi umat manusia dari perilaku keji di masa perang, dan membawa para pelaku ke pengadilan. Kami menyelidiki dan membongkar pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut tanggungjawab para pelaku. Kami mendesak pemerintah dan mereka yang memegang kekuasaan untuk mengakhiri praktik-praktik kejam dan menghormati hukum hak asasi manusia internasional. Kami menyambut masyarakat dan komunitas Internasional untuk mendukung perjuangan hak asasi manusia untuk semua.

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang memiliki staf di lebih dari 40 negara, dan kantor di Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moskow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, dan Zurich.

Untuk informasi lengkap, sila kunjungi situs kami: <http://www.hrw.org>

“Pemerintah Harus Bisa Menghentikan” Kekerasan Sektarian dan Pelanggaran Lain di Negara Bagian Arakan, Burma

Peta Kawasan Utara Negara Bagian Arakan.....	iv
Ringkasan.....	1
Rekomendasi Kunci	7
Metodologi	11
I. Latar Belakang.....	12
II. Kekerasan di Negara Bagian Arakan sejak Juni 2012	19
III. Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan Negara	22
Pemerintah Gagal Melindungi Korban dari Kekerasan Sektarian	22
Kekerasan Rohingya terhadap Arakan	23
Kekerasan Arakan terhadap Rohingya	24
Persekongkolan antara Arakan dan Aparat Keamanan Lokal.....	27
Pembunuhan oleh Aparat Keamanan	28
Penangkapan Massal terhadap Rohingya.....	30
Pengerahan Kekuatan Berlebihan dan Tak Perlu oleh Aparat Keamanan	32
Pelanggaran Hak Beragama	33
Pelanggaran Hak Tempat Tinggal, Relokasi Paksa, dan Pemulangan Para Pengungsi	35
Perusakan Properti.....	35
Relokasi Paksa.....	37
Tantangan Mengembalikan Pengungsi	38
IV. Bantuan Kemanusiaan	42
Akses untuk Makanan dan Larangan Kebebasan Bergerak	43
Risiko Bantuan Kemanusiaan: Kebencian dan Ancaman Warga Lokal	47
V. Penolakan Hak Kewarganegaraan untuk Rohingya.....	50
VI. Pemulangan Paksa dari Bangladesh	54
VII. Rekomendasi	56

Kepada Pemerintah Burma:	56
Kepada Pemerintah Bangladesh:	58
Untuk pemerintah yang prihatin dengan kondisi Burma, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, negara anggota Uni Eropa, dan Jepang:	58
Kepada Badan-badan PBB dan Komunitas Donor:	59
Kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Donor lain:.....	59
Ucapan Terimakasih	61
Lampiran: Terjemahan Pamflet yang Menganjurkan untuk Pemisahan Komunitas.....	62

Keterangan kronologi kejadian di peta:

28 Mei 2012

Seorang perempuan Arakan penganut Budha diperkosa dan dibunuh di Ramri, diduga oleh tiga pria Muslim Rohingya.

3 Juni 2012

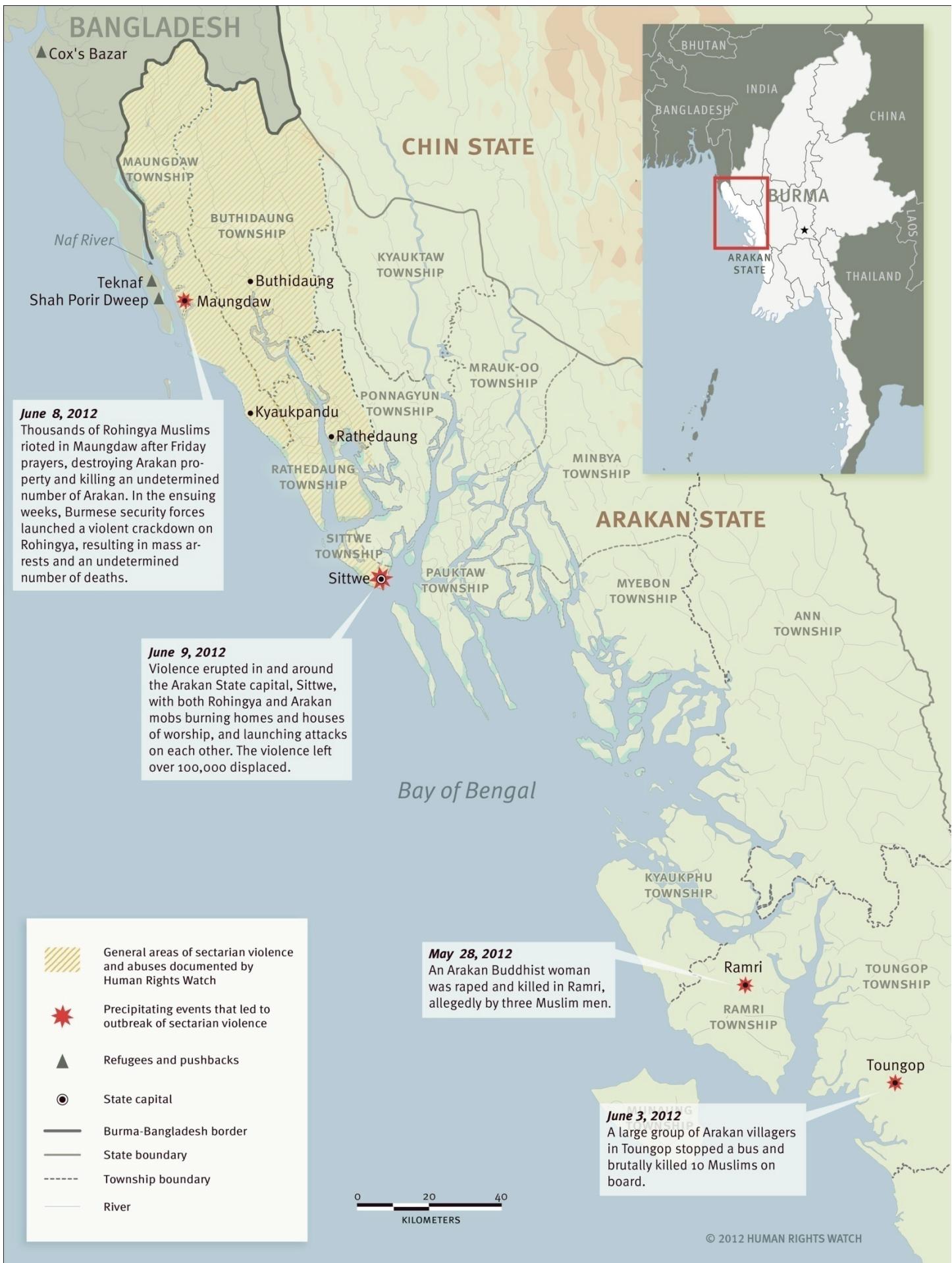
Sekelompok besar dari penduduk kampung Arakan di Toungop menghentikan sebuah bus dan membunuh dengan brutal 10 Muslim langsung di tempat.

8 Juni 2012

Ribuan Muslim Rohingya mengamuk di Maungdaw sesudah ibadah shalat Jumat, menghancurkan properti warga lokal Arakan dan membunuh sejumlah orang Arakan. Dalam minggu-minggu berikutnya, pasukan keamanan Burma melancarkan operasi kekerasan terhadap Rohingya, menyebabkan penangkapan massal dan belum pasti berapa yang tewas.

9 Juni 2012

Kekerasan meletus di Sittwe, ibukota Negara Bagian Arakan, dan sekitarnya, antara kelompok Rohingya dan Arakan dengan membakar rumah dan tempat ibadah, serta saling menyerang antar mereka. Ia mendorong lebih dari 100,000 orang mengungsi.



Ringkasan

Pada Juni 2012, kekerasan sektarian yang mengerikan meletus di Negara Bagian Arakan, kawasan barat Burma, antara etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingya (dikenal Muslim non-Rohingya). Kekerasan terjadi setelah sebuah kabar beredar pada 28 Mei, bahwa seorang perempuan Arakan diperkosa dan dibunuh di kota Ramri yang diduga dilakukan tiga pria Muslim. Rincian kejahatan itu disebarluaskan secara lokal dalam sebuah pamflet yang mengobarkan amarah, dan pada 3 Juni, sekelompok besar dari penduduk kampung Arakan di Toungop menghentikan sebuah bus dan membunuh dengan brutal 10 Muslim langsung di tempat. Human Rights Watch memastikan aparat militer dan polisi setempat berada di lokasi kejadian dan cuma melihat pembunuhan itu tanpa mencegahnya.

Pada 8 Juni, ribuan warga Rohingya mengamuk di kota Maungdaw sesudah ibadah shalat Jumat, menghancurkan properti dan membunuh warga Arakan, yang jumlahnya tak diketahui. Kekerasan sektarian kemudian menyapu dengan cepat sepanjang ibukota Negara Bagian Arakan, Sittwe, dan melebar di sekitar wilayah tersebut.

Mobilisasi kelompok dari kedua komunitas itu tanpa diduga segera merambat ke kampung-kampung tetangga, menewaskan penduduk dan menghancurkan rumah-rumah, pertokoan, dan tempat ibadah. Dengan minimnya atau bahkan tak ada sama sekali jaminan keamanan dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan, orang-orang yang bertikai mempersenjatai diri dengan parang, tombak, kayu, batang besi, pisau, dan senjata lain—and mulai main hakim sendiri. Sebagian besar properti dari kedua komunitas hancur seketika. Pemerintah mengklaim 78 orang tewas—taksiran angka konservatif—sementara lebih dari 100,000 orang mengungsi. Permusuhan juga dikobarkan sejumlah media anti-Muslim dan propaganda warga lokal.

Selama periode setelah perkosaan dan pembunuhan dilaporkan dan sebelum kekerasan meletus, ketegangan meningkat dengan dramatis di Negara Bagian Arakan. Namun, penduduk lokal dari kedua komunitas berkata pada Human Rights Watch bahwa otoritas Burma mengabaikan perlindungan dan tak bertindak untuk melakukan langkah-langkah khusus guna mendeteksi kekerasan.

Pada 10 Juni, khawatir kerusuhan akan menyeberang perbatasan Negara Bagian Arakan, Presiden Burma Thein Sein mengumumkan negara dalam keadaan bahaya, mengalihkan kontrol sipil pada militer Burma di kawasan yang terpapar konflik. Pada saat itulah gelombang kekerasan terpadu oleh berbagai aparat keamanan negara terhadap komunitas Rohingya dimulai. Contohnya, warga Rohingya di sepertiga wilayah Narzi—daerah Muslim terbesar di Sittwe, permukiman bagi 100,000 Muslim—menggambarkan bagaimana sekelompok massa Arakan membakar rumah-rumah mereka pada 12 Juni sementara aparat polisi dan pasukan paramiliter Lon Thein menembaki mereka dengan peluru tajam. Di kawasan utara Negara Bagian Arakan, penjaga perbatasan Nasaka, tentara, polisi dan Lon Thein terlibat pembunuhan, penangkapan massal, dan menjarah warga Rohingya.

Sesudah kejadian, pemimpin lokal Arakan dan sejumlah komunitas Arakan di Sittwe menyerukan pengusiran paksa terhadap komunitas Muslim dari kota, sementara para bikhu setempat memprakarsasi kampanye pengucilan, berseru agar penduduk penganut Budha untuk tidak berteman dan berbisnis dengan warga Muslim.

* * *

Didasarkan 57 wawancara yang dipandu di Burma dan Bangladesh dengan warga Arakan, Rohingya, dan lainnya, laporan ini memerinci awal peristiwa, aksi kekerasan yang melibatkan penduduk Arakan dan Rohingya, serta peran aparat keamanan negara yang gagal mencegah untuk menghentikan kekerasan sektarian sekaligus berpartisipasi langsung dalam tindakan kejam. Ia memerinci pemaksaan pengusiran yang diskriminatif terhadap Rohingya oleh pemerintah Burma dari penduduk Arakan yang mengabaikan mereka sekian lama.

Para saksimata menguraikan pada Human Rights Watch bagaimana otoritas Burma gagal memberi perlindungan kepada kedua kelompok pada awal-awal kejadian kekerasan. Berikutnya, warga Arakan dan pasukan keamanan lokal berkomplot dalam tindakan pembakaran dan aksi kejam lain terhadap Rohingya di Sittwe dan di kota-kota mayoritas Muslim di kawasan utara Negara Bagian Arakan.

Seorang ibu dari etnis Arakan, berusia 31 tahun, berkata pada Human Rights Watch bagaimana sekelompok besar Rohingya memasuki kampungnya di pinggiran Sittwe

sekitar 12 Juni dan membunuh suaminya. Dia berkata pemerintah tak memberi keamanan sama sekali. “Mereka membunuhnya di sana di kampung,” katanya. “Tanggannya dipotong dan kepalanya nyaris putus. Suami saya berumur 35 tahun.” Pria Arakan berusia 40 tahun di Sittwe berkata, “Pemerintah tak menolong kami. Kami tanpa makanan, tanpa tempat penampungan, dan tanpa jaminan keamanan [saat kami melarikan diri], tapi kami melindungi diri dengan batang kayu dan pisau.”

Pria etnis Rohingya, 36 tahun, di Sittwe, menceritakan bagaimana pasukan keamanan terlibat dalam kekerasan: “[Serangan dari warga Arakan] mulai dengan membakar rumah-rumah. Saat orang-orang berusaha memadamkan api, paramiliter menembaki kami. Dan kelompok massa memukul seseorang dengan kayu besar.” Pria Rohingya dari Narzi berkata, “Saya baru beberapa meter di jalan. Saya melihat mereka [polisi] menembaki setidaknya enam orang—satu perempuan, dua anak-anak, dan tiga laki-laki. Polisi mengambil mayat mereka.”

Penduduk lokal berkata segera setelah kekerasan sektarian mulai, pasukan keamanan negara melancarkan penyisiran brutal dan sistematis di kota-kota mayoritas Muslim di kawasan utara Negara Bagian Arakan, berkilah tindakan ini untuk mencari para tersangka perusuh. Antara 12-24 Juni, mereka memasuki kampung-kampung di sekitar Kotamadya Maungdaw, menembaki warga Rohingya, membakar properti, dan menangkap pria dan remaja, membawa mereka ke lokasi yang tak diketahui di mana sebagian besar dari mereka terputus kontak sejak saat itu. Sejumlah anggota keluarga dari mereka yang ditangkap berkata pada Human Rights Watch bahwa mereka tak mengetahui sanak-saudaranya sejak pasukan keamanan membawa mereka dalam truk dan berlalu pergi.

Pria etnis Rohingya berumur 22 tahun yang melarikan diri dari aparat keamanan, yang memasuki kampungnya di Kampus pada 26 Juni, berkata pada Human Rights Watch: “Kami lari dari kampung dan menerobos hujan di jalan raya [saat musim hujan angin] dan mereka menembak kami di jalan. Saya melihat 17 orang ditembak dan 9 di antaranya remaja dan pemuda. Polisi dari Maungdaw, Lon Thein, dan Nasaka terlibat dalam penyisiran.... Mayat-mayat tergeletak di jalanan, saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya terus lari untuk menghindari penangkapan. Suara tembakan terus-menerus berbunyi.”

Kekerasan dan penyiksaan berlatar sektarian membutuhkan upaya-upaya kemanusiaan mendesak bagi kedua komunitas Arakan dan Rohingya. Respon kemanusiaan atas krisis

ini sangat terhambat akibat akses terbatas ke kawasan terpapar konflik, terutama di wilayah utara Negara Bagian Arakan. Badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan independen serta staf lokal justru dijadikan subyek penangkapan, ancaman, dan intimidasi. Pada saat kebutuhan sangat diharapkan, pekerjaan mereka dipaksa nyaris macet.

Organisasi lokal yang melayani makanan, pakaian, obat-obatan dan penampungan bagi pengungsi penduduk Arakan, sebagian besar didukung sumbangan domestik, kebalikan dengan peruntungan penduduk Rohingya. Human Rights Watch bicara dengan warga Rohingya di Sittwe yang telah bersembunyi beberapa minggu, takut mereka akan menghadapi serangan berikutnya dari warga lokal Arakan bila muncul di depan umum. Akses mereka ke pasar, makanan, dan pekerjaan terus dibatasi karena bahaya melakukan kegiatan di ruang publik.

Warga Rohingya lain menetap di kamp-kamp darurat yang diawasi militer, di hutan, atau bertahan di rumah menunggu situasi agak reda, mencari tempat penampungan di beberapa lingkungan Muslim terakhir di Sittwe. Kebebasan bergerak warga lokal dibatasi oleh militer Burma, berkilah untuk perlindungan mereka sendiri, tapi masih banyak bantuan dan kondisi fisik yang kurang memadai di permukiman para pengungsi (dikenal *internally displaced persons* atau IDP) yang diperparah kondisi lebatnya musim hujan angin.

Beberapa warga Rohingya di kamp-kamp pengungsian berkata pada Human Rights Watch bahwa beberapa tentara Burma menunjukkan belas kasihan dan pergi ke pasar atas kemauan sendiri untuk membeli beras dan keperluan lain, tapi kerelaan mereka segera berhenti. Para serdadu menolak secara informal untuk bantu Rohingya beli makanan terkait kampanye warga lokal oleh para bikhu Arakan—pemuka yang paling dihormati anggota masyarakat lokal Arakan—yang menyebarkan pamflet, menganjurkan pemisahan masyarakat berdasarkan etnis dan memohon warga Arakan mengucilkan warga Muslim dengan alasan apapun. “Mereka makan dari beras kita dan tinggal di dekat rumah kita,” seorang penulis pamflet kepada Human Rights Watch. “Jadi kami akan memisahkan mereka. Kami perlu melindungi warga Arakan.... Kami tidak ingin berhubungan apapun dengan orang-orang Muslim sama sekali.”

Pada akhir Juni, pemerintah pusat mengabsahkan penilaian sebuah lintas-lembaga tanggap darurat PBB dan badan bantuan internasional, yang memungkinkan mereka

memahami ruang lingkup kebutuhan mendesak. Namun, badan bantuan ini tak bisa menilai situasi di beberapa tempat di kawasan utara Negara Bagian Arakan. Akses kemanusiaan dibatasi oleh pemerintah Burma dan penduduk lokal Arakan yang terbakar kebencian, mengklaim mereka ini hanya fokus pada penduduk Rohingya selama bertahun-tahun dan mengabaikan penderitaan warga Arakan.

Sementara semua unit keamanan yang beroperasi di Negara Bagian Arakan terlibat dalam pelanggaran HAM serius, pada saat yang sama tentara bertindak positif. Pada awal kekerasan, kehadiran militer di Sittwe menenangkan situasi dan disambut baik kedua komunitas. Human Rights Watch yang mengamati unit-unit militer Burma di Sittwe memainkan peran konstruktif dalam meredam kekerasan pada akhir Juni dengan menjaga kelompok pengungsi Rohingya dan menyerukan di depan umum kepada penduduk untuk melucuti senjata. Human Rights Watch juga menyaksikan tentara mengantar Rohingya melalui ibukota pada akhir Juni untuk mengemas barang-barang pribadi dari rumah dan kios pasar mereka di kota sebelum kembali ke kamp pengungsian, betapapun kami tidak dapat menentukan tindakan ini sebagai bagian dari tugas normal atau minta bayaran.

Pada saat bersamaan, tentara berkolaborasi dengan elemen-elemen aparat keamanan dalam penyisiran brutal sepanjang kawasan utara Negara Bagian Selatan. Menurut pria Rohingya berumur 27 tahun yang menyelamatkan diri dari kotapraja Maungdaw, “Militer datang dan bicara pada kepala desa dan minta dia untuk memberi nama-nama orang yang terlibat dalam kekerasan. Mereka datangi satu demi satu rumah, pintu ke pintu, mengambil orang-orang. Mereka yang ada dalam daftar tak ada yang tahu di mana mereka, dan mereka yang tak ada dalam daftar bisa bebas jika membayar uang.”

* * *

Populasi Rohingya dan Arakan di Burma, sekitar 800,000 hingga 1,000,000 orang, kerap kali bentrok pada hari biasa dan saling memusuhi sekian lama. Pemerintah Burma berkali-kali mendiskriminasi etnis Rohingya, yang menyatakan mereka sebagai warga asing tanpa hak tinggal di Burma, sebuah pandangan yang diyakini bersama penduduk Arakan. Ini dimulai dengan kebijakan negara sejak 1982, saat undang-undang kewarganegaraan disahkan pemerintahan junta militer yang mengecualikan Rohingya dari warga Burma, secara efektif memaksa mereka tanpa berkewarganegaraan.

Tiadanya status hukum bagi Rohingya menyumbang ketegangan di Negara Bagian Arakan. Secara hukum, mereka yang diakui warga negara adalah salah satu dari apa yang disebut “ras nasional”, yang tak memasukkan Rohingya, atau mereka yang moyangnya menetap di negara ini sebelum 1823, tahun dimulai pendudukan kerajaan Inggris di wilayah yang kini menjadi Negara Bagian Arakan. Bagi mereka yang tak bisa memberikan “bukti-bukti meyakinkan” akan leluhur mereka yang bermukim di Burma sebelum 1823, akan ditolak kewarganegaraan penuh dan hak tempat tinggal. Rohingya menghadapi pembatasan dalam kebebasan bergerak, akses pendidikan, dan pekerjaan—hak-hak yang dijamin untuk non-warga negara maupun warga negara menurut hukum internasional. Ribuan etnis Rohingya terlantar ini bisa jadi menghadapi kelaparan serius dan kemungkinan mati kelaparan tanpa intervensi Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sentimen Anti-Rohingya dan anti-Muslim, perkara langgeng dari lanskap politik dan sosial Burma, kian menajam sejak kekerasan meledak pada bulan Juni. Para pejabat pemerintah Burma biasa merujuk Rohingya sebagai “Bengali,” “apa yang dinamakan Rohingya”, atau istilah “Kalar” yang merendahkan, dengan berbagai terjemahan yang mengganggu. Rohingya menghadapi permusuhan lebih luas dari masyarakat Burma, termasuk dari pendukung setia pro-demokrasi dan sejumlah nasionalis etnis yang sama-sama ditindas negara Burma.

Pada perjalanan ke Eropa selama krisis—untuk kali pertama diizinkan ke luar negeri dalam 24 tahun—ikon demokrasi dan pemimpin partai oposisi Aung San Suu Kyi memandang kekerasan sektarian di Negara Bagian Arakan secara keliru sebagai akibat dari kegagalan pemerintah menerapkan undang-undang imigrasi. Dia mengatakan dirinya “tidak tahu” bila Rohingya harus dianggap sebagai warga Burma, mengutip pandangan populer bahwa Rohingya sebagai orang asing atau “penyusup.” Dia menyarankan “beberapa dari mereka” akan memenuhi persyaratan undang-undang kewarganegaraan, dan menyalahkan masalah pada tiadanya kejelasan hukum.

Sejumlah aktivis demokrasi lain mengobarkan pernyataan anti-Rohingya. Pada awal Juni, aktivis pro-demokrasi terkemuka Ko Ko Gyi bicara di konferensi pers di Rangoon dan menolak mengkategorikan Rohingya sebagai kelompok etnis Burma. Meski mengakui etnisitas bukanlah persyaratan untuk kewarganegaraan, dia menyalahkan kekerasan sektarian sebagai perkara “imigran ilegal dari Bangladesh” dan “provokasi kotor dari komunitas internasional,” merujuk perhatian dunia Barat untuk Rohingya. “Upaya campur

tangan dari negara-negara kuat pada isu ini tanpa sepenuhnya memahami kelompok etnis Burma, akan dianggap menyinggung kedaulatan bangsa kita,” katanya.

Perlakuan kejam terhadap Rohingya tak sebatas di Burma, tapi ditunjukkan dengan jelas oleh negara tetangga Bangladesh, secara tak manusiawi dan ilegal, menyangkut krisis ini. Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh melalui perjalanan laut dengan menumpang perahu kayu yang buruk, atau menyeberangi perbatasan lewat Sungai Naf atau rute alternatif. Di kawasan selatan Bangladesh, sekitar 30,000 pengungsi Rohingya telah tinggal beberapa dekade di dua kamp penampungan terjorok di dunia, dan sekitar 40,000 nyaris hidup dalam apa yang disebut “kamp tak resmi”, dan 160,000 orang tinggal di luar kamp pengungsian. Namun saat kekerasan sektarian meletus pada bulan Juni, pemerintah Bangladesh, melanggar kewajiban hukum internasional bagi pencari suaka, memerintahkan penjaga perbatasan dan satuan angkatan laut mencegah siapapun yang menyeberangi perbatasan. Pria, perempuan, dan anak-anak Rohingya yang tiba di tepi pantai dan memohon kemurahan hati otoritas Bangladesh, disuruh kembali ke pantai dengan perahu yang sudah rusak selagi musim hujan angin yang buruk, menempatkan mereka dalam risiko tenggelam atau persekusi di Burma. Belum pasti berapa orang yang tewas saat mereka dipaksa pulang.

Mereka yang berhasil memasuki negara Bangladesh tetap bersembunyi tanpa perlindungan resmi dari pemerintah Bangladesh atau PBB dan tanpa akses bantuan kemanusiaan sebagai akibat dari keputusan kebijakan pemerintah Bangladesh.

Rekomendasi Kunci

Pada 10 Juni, Presiden Thein Sein berbicara atas nama negara. “Bila kita terus membenci dan saling dendam tanpa akhir dengan membunuh satu sama lain, mungkin saja bahaya akan lebih luas, tak hanya di Negara Bagian Arakan,” katanya. “Jika ini terjadi, tanpa ragu, akan menyebabkan kerugian parah pada demokrasi kita yang baru tumbuh—stabilitas dan pembangunan.” Ini pernyataan yang disambut baik dan menenangkan situasi. Namun, pada 12 Juli, presiden bersikap mendukung para ekstrimis anti-Rohingya saat dia berkata “satu-satunya solusi” membiarkan pengusiran Rohingya ke negara lain atau ke kamp pengungsian yang diawasi Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)—secara pasti merujuk kamp UNHCR di Bangladesh. “Kita akan mengirim mereka jika ada negara ketiga yang akan menerima mereka,” kata Thein Sein. “Itu yang kami pikir menjadi solusi

untuk masalah ini.” UNHCR langsung menolak proposal tersebut, menyatakan, “Sebagai badan pengungsi, kami tidak biasa berpartisipasi dalam menciptakan pengungsi.”

Thein Sein tepat saat mengatakan kerusuhan dan pelanggaran yang terus berlanjut oleh pasukan keamanan akan menggagalkan proses reformasi demokrasi dan menyebar ke bagian lain di negeri ini, seperti halnya kelompok-kelompok minoritas etnis lain bisa kian waspada terhadap pemerintah yang menyatakan komitmennya untuk meningkatkan hubungan dengan populasi etnis. Persekusi telanjang terhadap kelompok minoritas akan menjadi lebih sulit bagi donor pemerintah, badan-badan multinasional, dan lembaga keuangan internasional untuk memandunya dengan bantuan pembangunan. Jika pemerintah ingin dilihat sebagai pendukung reformasi, dan layak menerima sejumlah besar bantuan internasional, investasi, dan dukungan yang sangat jelas diinginkan, ia perlu mengendalikan pasukan keamanan dan mengakhiri kebijakan, praktik dan pernyataan publik yang diskriminatif terhadap penduduk yang terbukti rentan secara etnis. Pemerintah juga perlu berkomitmen untuk mereformasi undang-undang kewarganegaraaan yang kuno dan diskriminatif. Rohingya tak bisa dan tak boleh dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan mereka harus diakui sebagai warga negara dalam dasar serupa sebagai anggota kelompok nasional lain.

Untuk menunjukkan keseriusan dalam mengatasi penyiksaan, pemerintah harus mengizinkan pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Burma, Tomas Quintana, mendapatkan akses penuh untuk menyelidki kekerasan di semua pihak dan mengambil tindakan untuk menahan para pelaku. Mereka yang bertanggung-jawab memerintahkan atau terlibat dalam penyiksaan selama dan setelah kekerasan sektarian di Negara Bagian Arakan harus diselidiki dan didisplinkan secara imparisial atau dituntut dengan pantas. Untuk menyelamatkan mereka yang ditawan, pemerintah mesti segera membuka informasi pada pelapor khusus mengenai apa yang diduga warga Rohingya masih ditahan di tempat rahasia.

Untuk mengatasi pelanggaran kronis dan sistematis di Negara Bagian Arakan dan di mana pun, pemerintah harus mengundang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) membuka kantornya di Burma dengan mandat perlindungan dan pengawasan penuh, termasuk upaya mendirikan kantor cabang di Negara Bagian Arakan dan wilayah lain. Pemerintah mesti bekerja dengan organisasi non-pemerintah lokal dan internasional, dan badan-badan PBB, guna memenuhi bantuan kemanusian mendesak bagi Rohingya,

Arakan, dan penduduk Muslim non-Rohingya, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa kecuali bagi penduduk yang terpapar konflik, serta menjamin keselamatan dan keamanan bagi organisasi kemanusian yang menjadi sasaran ancaman bertubi-tubi. Dalam jangka menengah, otoritas perlu bekerja dengan warga pengungsi untuk mencari solusi terbaik, menghormati hak asasi mereka, untuk kembali pulang dan hidup aman. Apabila diperlukan, pemerintah harus memberikan ganti rugi kepada penduduk lokal yang propertinya hancur dan mengembangkan strategi komprehensif guna mengakhiri kekerasan dan mempromosikan rekonsiliasi dengan warga lokal.

Pemerintah harus segera mengamandemen pasal-pasal diskriminatif dalam Undang-undang Kewarganegaraan 1982 sehingga Rohingya diperlakukan dalam cara setara sebagai anggota dari delapan kelompok etnis lain, sebagaimana tercantum dalam undang-undang kewarganegaraan, yang kini masih disebut sebagai kelompok etnis tak dikenal dan dikecualikan sebagai warga negara. Semua undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif lain harus direvisi atau dicabut.

Pemerintah Burma juga perlu melawan prasangka mendalam dari dalam birokrasinya sendiri dan masyarakat Burma yang memanifestasikan diri dalam diskriminasi dan kekerasan terhadap penduduk Rohingya. Ini mesti dilakukan dengan kampanye informasi publik berbasis luas yang mendukung toleransi dan non-diskriminasi. Secara khusus, harus menegaskan bahwa Rohingya merupakan salah satu dari beragam kelompok etnis yang membentuk Kesatuan, dan perkembangan negara bergantung dengan mengakhiri siklus lama kekerasan dan diskriminasi.

Banyak warga Arakan dan Rohingya mengambil kesimpulan bahwa pecahnya kekerasan sektarian dan kerusuhan yang menyertainya bisa dihindari. Pria 29 tahun dari Arakan dan pria lebih tua dari Rohingya yang terperangkap sentimen lokal saat mereka bicara secara terpisah dengan Human Rights Watch mengatakan hal serupa, “Pemerintah bisa menghentikannya.” Ini tak terlalu terlambat bagi pemerintah untuk ambil tindakan efektif dengan membawa realitas kebencian etnis pada landasan bersama melalui retorika persasif akan reformasi demokrasi. Tiap kegagalan melakukannya hampir pasti akan membawa pertumpahan darah dan kekerasan di masa depan.

Pemerintah Bangladesh juga harus memikirkan kembali kebijakannya menolak untuk menyediakan jaminan keselamatan bagi para pencari suaka Rohingya. Ia mesti menerima

tawaran bantuan kemanusian yang sudah diajukan para donor—dan permintaan lain. Ia harus menerima tawaran permukiman terbatas bagi warga Rohingya yang sudah dalam kamp resmi—and menganjurkan banyak lagi. Namun ia tak bisa mengklaim sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia atau menegakkan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan menteri luar negeri Bangladesh di parlemen pada bulan Juni, bila terus membiarkan pengungsi menghadapi kematian dengan akses air minum tak lebih dari sebotol air.

Semua ini takkan terjadi bila komunitas internasional merespon dengan meningkatkan keadaan mendesak secara dramatis. Jika peristiwa serupa terjadi satu atau dua tahun lalu, sebelum proses reformasi di Burma berlangsung, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan negara lain hampir pasti segera mengutuk pemerintah Burma dalam istilah paling keras. Kegagalan pemerintah mencegah kekerasan dan terlibat setelahnya dalam pelanggaran serius akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut dari kebutuhan reformasi segala sektor pemerintahan dan aparat keamanan. Kini, terjebak dalam euforia terhadap sikap pemerintah Burma yang menerima oposisi pendukung demokrasi, berunding dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata, dan kesempatan meningkatkan perdagangan dan investasi secara dramatis di negeri ini, sebagian besar dunia hanya menawarkan tanggapan diam-diam, sebagai apa yang dianggapnya sikap terbaik.

Pemerintah AS telah menghentikan banyak sanksi dan mendorong investasi, bahkan mengumumkan pada 11 Juli yang mengakhiri sanksi-sanksi investasi kunci saat puncak krisis di Negara Bagian Arakan. AS dan negara lain memikul tanggungjawab khusus untuk mengirimkan pesan jelas kepada otoritas di Burma bahwa represi brutal terhadap Rohingya dan minoritas lemah lain tak bisa ditoleransi dan akan merusak hubungan dengan pemerintah. Cara otoritas Burma merespon krisis dan melanggengkan persekusi dan diskriminasi harus dipandang sebagai ongkos hubungan ini. Pemimpin dunia harus berkata dalam pengertian yang jelas dan tegas.

Metodologi

Human Rights Watch melakukan riset untuk laporan ini pada Juni 2012 di Burma dan Bangladesh. Sebagian besar didasarkan 57 wawancara dengan individu-individu yang menjadi saksimata atau mereka yang tersulut kekerasan, termasuk 22 etnis Arakan dan 28 etnis Rohingya.

Pemerintah Burma dan Bangladesh tak mengizinkan organisasi nonpemerintah independen untuk bebas meneliti atau mengawasi situasi hak asasi manusia di kawasan yang terpapar konflik sektarian ini. Akibatnya, mendapatkan dan membuktikan informasi kredibel merupakan tantangan besar. Di Burma, Human Rights Watch mengunjungi tiga kamp informal bagi para pengungsi Arakan di Negara Bagian Arakan. Kami mewawancarai warga Rohingya di lokasi aman, baik di Negara Bagian Arakan maupun di Bangladesh.

Sebagian besar yang kami wawancarai memakai bahasa Burma, Arakan, dan Rohingya, dengan penerjemah bahasa Inggris. Beberapa kasus, kami wawancara dalam bahasa Inggris. Mengingat kemungkinan aksi balasan, kami menyamarkan nama-nama korban dan saksimata serta mengaburkan tanggal dan lokasi persis wawancara. Kami menggunakan nama samaran bagi semua orang yang diwawancara dalam laporan ini, dan inisial nama tak merujuk inisial sebenarnya bagi para narasumber; inisial sebatas untuk memungkinkan pembaca membedakan nama-nama sumber. Dalam beberapa kasus, informasi identitas disembunyikan demi kepentingan kerahasiaan dan keamanan.

Semua narasumber diberitahu tujuan wawancara, bersifat sukarela, dan bagaimana informasi mereka akan dipakai. Semua menyatakan persetujuan lisan. Tak ada yang menerima kompensasi.

Selain penelitian lapangan, kami memakai sejumlah sumber sekunder termasuk laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, studi akademis dan publikasi lain, laporan Human Rights Watch sebelumnya, dan laporan organisasi nonpemerintah lain.

I. Latar Belakang

Lokasi Negara Bagian Arakan di kawasan barat Burma, berbatasan Teluk Benggala sebelah barat, Bangladesh di baratlaut, Negara Bagian Chin Burma di utara, serta Magwe, Bago, dan Divisi Irrawaddy di timur. Dataran subur dan lahan basah pesisir di daerah ini dipisahkan dari daerah Burma lain oleh barisan pegunungan Arakan-Yoma, yang selama berabad-abad di bawah kerajaan Arakan guna mempertahankan kemerdekaan politik dari kerajaan Burma¹ di dataran rendah.

Negara Bagian Arakan berpenduduk agraris dan salah satu termiskin di Burma, dengan lebih dari 43,5 persen hidup di bawah garis kemiskinan, nomor dua setelah Negara Bagian Chin, menurut penelitian Program Pembangunan PBB² 2011. Namun cadangan gas alam bernilai puluhan miliar dolar ditemukan di Teluk Benggala di lepas pantai Negara Bagian Arakan. Perusahaan-perusahaan China, Korea Selatan dan India mendulang gas bekerjasama dengan Perusahaan Minyak dan Gas yang dimiliki negara Myanmar, di antaranya, di bawah kontrak tertutup saat negosiasi dengan bekas pemerintahan militer³. Jaringan pipa pengangkutan minyak dan gas kini dibangun dari Negara Bagian Arakan hingga Provinsi Yunnan di China⁴.

Interpretasi mengenai sejarah awal dan moderen Arakan terus-menerus dikontestasikan. Pertanyaan historis tentang siapa di antara penduduk negara yang mengklaim diri dengan sah sebagai penduduk pribumi, di samping mayoritas etnis Arakan sebagai penganut Budha, menjadi isu yang sangat kontroversial. Pemerintah Burma dan masyarakat Burma umumnya menolak sama sekali penduduk Muslim dari negara bagian Arakan, banyak dari

¹ Negara etnis Burma akhirnya menaklukan kerajaan Arakan pada 1784—tahun yang bernilai sejarah penting hingga hari ini ditentang sangat oleh nasionalis etnis Arakan—and kawasan tersebut terbelenggu secara politik dan ekonomi sejak saat itu. Orang Arakan, secara umum, melawan keras apa yang mereka anggap sebagai pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma.

² Majelis Umum PBB, “Laporan Pelapor Khusus tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar,” A/66/365 (16 September 2011), halaman 17; Program Pembangunan PBB, “Survei Kondisi Hidup Rumahtangga Terpadu di Myanmar (2009-2010): Laporan Dinamika Kemiskinan,” Juni 2011.

³ Lihat Human Rights Watch, “*Untold Miseries*: Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State, Maret 2012, hal. 32-33, <http://www.hrw.org/reports/2012/03/20/untold-miseries> (diakses 16 Juli 2012); Siaran pers Human Rights Watch, “Burma: Proyek Gas Alam Mengancam Hak Asasi Manusia,” 24 Maret 2007, <http://www.hrw.org/news/2007/03/23/burma-natural-gas-project-threatens-human-rights> (diakses 16 Juli 2012); Matthew F. Smith, “Bad Business for Burma,” *International Herald Tribune*, 13 April 2011, <http://www.nytimes.com/2011/04/04/opinion/04iht-edsmith04.html> (diakses 16 Juli 2012); Lihat juga the Shwe Gas Movement, www.shwe.org (diakses 16 Juli 2012) dan EarthRights International, www.earthrights.org (diakses 16 Juli 2012).

⁴ Human Rights Watch, “*Untold Miseries*”, hal. 32-33,

mereka mengidentifikasi sebagai Rohingya, mengakuinya sebagai warganegara Burma, apalagi pengakuan sebagai kelompok etnis berbeda di Burma. Kebanyakan warga Burma, dari semua etnis, menolak istilah Rohingya dan biasanya merujuk penduduk Muslim di Negara Bagian Arakan sebagai “Bengali,” “mereka yang mengaku Rohingya,” atau sebutan merendahkan “Kalar,” mengkalim mereka sebagai migran gelap dari apa yang sekarang negara Bangladesh.

Meski demikian, ada penduduk Muslim di Burma bagian barat selama berabad-abad. Penggunaan istilah “Rohingya” dalam bahasa Inggris setidaknya disebutkan dalam publikasi penelitian pada 1799 dalam bahasa Burma, oleh doktor medis Francis Buchanan, yang menulis dialek penduduk Burma bagian barat “diucapkan oleh [Muslim], yang telah lama menetap di Arakan, dan menyebut mereka sebagai Rooinga, atau penduduk asli Arakan.”⁵

Arakan pada masa kuno dianggap sebagai perluasan dari India utara⁶. Beberapa sumber menyebut wilayah Negara Bagian Arakan dihuni sebagian besar orang India hingga daerah tersebut diserbu oleh salah satu suku Tibeto-Burma paling awal yang memasuki kawasan apa yang kini menjadi Burma, di mana menjadi sentrum “pendatang baru bercampur dengan penduduk asli dan membentuk Kerajaan Arakan.”⁷ Pada 1404, saat Kerajaan Ava dari Burma utara menyerang Kerajaan Arakan, raja Arakan, Naramithla menyelamatkan diri ke Benggala, tempat dia hidup dalam pengasingan hingga tahun 1430 sebelum kembali ke Arakan dan mendirikan ibukota Arakan, Mrauk-U. Saat di pengasingan, sang raja pindah agama Islam di kota Benggala, Guar, dan pengaruhnya tercermin saat kembali ke Arakan, ketika dia mendirikan apa yang kemudian disebut “pengadilan hibrida yang menakjubkan antara Buddha-Islam, menggabungkan tradisi dari Persia dan India serta dunia Buddha dari timur.”⁸ Sesudahnya, pada abad 15, raja-raja Arakan menyalin dan memakai koin dengan inskripsi Islam dan koin dari Benggala; bahasa Persia yang dipakai dalam hubungan diplomatik pada abad 17 dan 18; dan peperangan Mughal-Arakan di Benggala timur meningkatkan perdagangan aktif, dan sangat disesalkan, perbudakan Benggala.

⁵ Francis Buchanan, “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire,” *Asiatic Researches* 5 (1799), hal. 234, www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf (diakses 26 Juli 2012).

⁶ Michael Charney, “Arakan, Min Yazagyi and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Southeast Asia,” *SOAS Bulletin of Burma Research*, 3:2, 2005.

⁷ Quoted in Bertil Lintner, *Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948*, (Chiang Mai: Silkworm, 1999), hal. 65.

⁸ Thant Myint-U, *The River of Lost Footsteps: Histories of Burma* (Farrar, Straus & Giroux: New York, 2006), hal. 72

Periode kolonial Inggris menyebabkan perubahan hubungan etnis dan agama di negara. Perang pertama Anglo-Burma, dari 1824 hingga 1826, menjadikan kawasan Arakan di bawah pemerintahan kolonial Inggris hingga kemerdekaan Burma pada 1948. Selama periode kolonial, Inggris memindahkan ibukota dari Mrauk-U ke apa yang kini dikenal Sittwe, dan tiada batasan secara politik antara Arakan dan Benggala, menimbulkan arus populasi baru antara Chittagong, atau Benggala timur, dan Arakan⁹. Populasi Muslim di Negara Bagian Arakan meningkat secara signifikan selama periode ini, dari sekira 58,000 pada 1871 menjadi 179,000 pada 1911, menurut catatan kolonial Inggris¹⁰. Informasi ini telah dipakai oleh beberapa orang untuk membantah bahwa Rohingya sebagai etnis minoritas sejak mula itu tidak ada; bahwa kehadiran Rohingya hanya ada sebagai konstruksi moderen; dan semua “yang menyebut Rohingya” adalah keturunan langsung para migran dari Benggala selama periode kolonial Inggris¹¹. Klaim ini kemudian diterima secara luas di Burma, dan berjalan, karena undang-undang mutakhir Burma menolak kewarganegaraan bagi mereka yang tidak bisa membuktikan leluhur mereka di Burma sebelum pemerintahan kolonial Inggris. Sementara warga Rohingya dan Benggala dari Bangladesh dalam banyak hal secara fisik sulit dibedakan satu sama lain, Rohingya di Burma bicara dalam dialek yang unik dari Benggala, berbeda dari bicara orang Benggala di sepanjang perbatasan, dan banyak orang Rohingya di Burma bicara dengan bahasa Burma¹².

Setelah kemerdekaan Burma pada 1948, negara dalam reformasi politik post-kolonial yang ditandai dengan instabilitas politik dan konflik etnis bersenjata hingga kudeta militer pada 1962, mengantarkan pemerintahan junta militer selama lebih dari 60 tahun berikutnya. Selama periode junta militer, hingga sekarang—yang masih ditandai dengan parlemen didominasi militer—angkatan darat Burma terlibat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Arakan dan Rohingya di Negara Bagian Arakan, termasuk pembunuhan, kerja paksa yang meluas, pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan lahan, dan beragam pelanggaran lain.

⁹ Jacques Leider, “Arakanese Studies: Challenges and Contested Issues,” makalah konferensi, “Arakan History Conference,” Bangkok, Thailand, 23-25 November 2005, hal.15-16.

¹⁰ Aye Chan, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar),” SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, hal. 401.

¹¹ *Ibid.*

¹² Human Rights Watch, *Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas*, Mei 2009, hal. 6, <http://www.hrw.org/reports/2009/05/26/perilous-plight-o> (diakses 12 Juli 2012).

Warga Arakan telah memainkan peran penting dalam membela hak asasi manusia dan mempromosikan demokrasi di Burma, meski di bawah represi terus-menerus yang luarbiasa. Misalnya, etnis Arakan merupakan pemain kunci dalam momentum perlawanan pada 2007 selama demonstrasi seantero negeri yang dipimpin para bikhu, menentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipaksakan pemerintah. Pada awal-awal demonstrasi, 28 Agustus 2007, aparat keamanan negara menangkap demonstran di Rangoon, sekitar 200 bikhu ditangkap di jalanan di Sittwe, secara signifikan mengubah jalannya protes—terbesar di Burma dalam dua dekade. Segera sesudahnya, ratusan ribu orang turun ke jalan dalam protes seluruh negeri. Dikenal sebagai “revolusi kuning-jingga,” merujuk warna jubah tradisional para bikhu, pemerintahan militer Burma membubarkan dengan brutal para demonstran yang mengejutkan dunia internasional. Di antara mereka yang dihilangkan paksa oleh pemerintah dalam meredam demonstrasi tersebut adalah beberapa bikhu dan aktivis di Negara Bagian Arakan.¹³

Sejak kemerdekaan, muncul pemberontakan bersenjata dari Arakan dan Rohingya, yang relatif kecil dan kadang berlangsung singkat, di negara bagian, keduanya melawan pemerintah pusat dengan tujuan berbeda, tapi tak ada pemberontakan yang terbukti menghasilkan signifikansi politik. Partai Pembelaan Arakan (Arakan Liberation Party)—sayap politik kelompok bersenjata Arakan—pada April 2012 menandatangani klausul gencatan senjata dengan pemerintah Burma, dan masih menikmati dukungan moral yang luas di Negara Bagian Arakan¹⁴. Ini berbeda dengan berbagai pemberontakan bersenjata Rohingya, yang mendapat dukungan kecil di antara penduduk Muslim dan dikabarkan menerima beberapa bantuan, dalam bentuk uang, dari organisasi ekstrimis internasional¹⁵.

Sementara kedua penduduk begitu menderita di bawah pemerintahan Militer, penindasan terhadap Rohingya berlipat ganda dengan penolakan mereka dari kewarganegaraan Burma. Contohnya, pada pertengahan 1970-an, Burma mewajibkan semua warganegara memiliki Sertifikat Registrasi Nasional di bawah Undang-undang Imigrasi Darurat, tapi

¹³ Human Rights Watch, *Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma*, December 2007; Unit Dokumentasi Human Rights, National Coalition Government of the Union of Burma, *Bullets in the Alms Bowl: An Analysis of the Brutal SPDC Suppression of the 2007 Saffron Revolution*, Maret 2008, hal. 37.

¹⁴ Partai Pembelaan Arakan (ALP) setuju genjatan senjata dengan pemerintah pada 5 April 2012. Lihat “Myanmar’s peace process with ethnic rebel groups,” 6 April 2012; Beberapa penduduk Arakan yang diwawancara Human Rights Watch mengungkapkan dukungan pada ALP. Lihat, sebagai contoh, Wawancara Human Rights Watch dengan D.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹⁵ Lihat Andrew Selth, “Burma and International Terrorism,” *Australian Quarterly*, vol. 75, no. 6, Nov.-Des 2003, hal. 23-28.

Rohingya satu-satunya yang diberi Kartu Registrasi Warga Asing, di mana oleh banyak sekolah dan pengusaha tidak diterima¹⁶.

Pada 1977, pemerintah memprakarsai sebuah program yang disebut Naga Min (Raja Naga) yang “meneliti setiap orang yang menetap di Negara, menunjuk tiap warga negara dan warga asing sesuai dengan undang-undang dan mengambil tindakan terhadap warga asing yang telah disaring ke negara secara ilegal.¹⁷” Selagi program ini berlangsung nasional, prosesnya di Arakan berujung memburuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia secara massif terhadap Rohingya oleh tentara angkatan darat dan warga lokal Arakan serta pihak berwenang¹⁸. Terjadi pembunuhan, penangkapan massal, penyiksaan, dan pelanggaran lain, mendorong lebih dari 200,000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh¹⁹. Pada saat yang sama, pemerintah Burma mengkalim, “19,457 orang Benggala kabur untuk menghindari pemeriksaan karena mereka tidak punya dokumen registrasi yang sah,” mengacu Rohingya sebagai orang Benggala dan terlalu meremehkan jumlah pengungsi²⁰. Di Bangladesh, otoritas memotong bantuan makanan kepada pengungsi dalam upaya memaksa mereka kembali ke Burma; lebih dari 12,000 orang kelaparan hingga tewas²¹. Para penyintas dipaksa pulang ke Burma, menetap terutama di kawasan utara Negara Bagian Arakan²².

Pada 1983, dalam apa yang tampaknya menjawab pemulangan massal warga Rohingya ke Burma oleh Bangladesh, pemerintah Burma menyelesaikan sensus nasional di mana

¹⁶ Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, September 1996, hal. 29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a84a2.html> (diakses 12 Juli 2012).

¹⁷ Pernyataan Menteri Urusan Dalam Negeri dan Agama, 16 November 1977, dikutip dalam laporan Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, hal. 12.

¹⁸ Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, hal. 12.

¹⁹ Human Rights Watch, *Perilous Plight*, Mei 2009, p. 6, (diakses 12 Juli 2012); Human Rights Watch, *Malaysia/Burma: Living in Limbo: Burmese Rohingyas in Malaysia*, Agustus 2000, <http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/malaysia/index.htm#TopOfPage> (diakses 12 Juli 2012); Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*.

²⁰ Quoted in Bertil Lintner, *Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948*, hal. 317.

²¹ Alan Lindquist (kepala kantor cabang UNHCR di Cox Bazaar pada 1978), “Report on the 1978-1979 Bangladesh Refugee Relief Operation,” Juni 1979. Lindquist mencatat pada halaman 9: “Tak ada seorang pun dari kepala badan PBB yang mengajukan keberatan untuk memberikan makanan sebagai senjata politik,” Lihat juga Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, hal.3

*“None of the U.N. agency heads raised any objection to using food as a political weapon.” See also Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, p.3.*

²² Carl Grundy-Warrand dan Elaine Wong, “Sanctuary Under a Plastic Sheet: The Unresolved Problem of Rohingya Refugees,” IBRU Boundary and Security Bulletin, vol.5, no.3, Autumn 1997, hal.79-91; Human Rights Watch, *Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the Seas*, Mei 2009, hal. 6.

Rohingya tak dihitung, membuat mereka tanpa kewarganegaraan melalui pengecualian. Undang-undang Kewarganegaraan 1982 mengatur pengecualian itu.

Pada 1991, tentara angkatan darat Burma mengulangi lagi pengusiran warga Rohingya, mendorong lebih dari seperempat juta terusir dari Negara Bagian Arakan ke wilayah Teknaf dan Cox Bazaar di Bangladesh. Militer angkatan darat Burma memotong dan membakar jalan kampung, membunuh ratusan orang dan memaksa arus baru pengungsi. Bangladesh sekali lagi menolak para pengungsi dan memaksa mereka menempati permukiman pengungsi yang kumuh dan jorok.

Human Rights Watch mendokumentasikan pengusiran paksa pemerintah Bangladesh ke Burma terhadap beberapa orang dari 50,000 warga Rohingya antara September 1992 dan akhir tahun 1993. Pada saat yang sama, Komisi Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) tidak hadir di Burma dan tanpa perjanjian dengan pemerintah Burma untuk menyediakan bantuan bagi para pengungsi yang kembali pulang²³. Ada pelanggaran serius di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, termasuk pemukulan dan penolakan ransum makanan oleh otoritas kamp, yang secara langsung memaksa pengungsi kembali ke Burma, kelakuan serupa pemerintah Burma pada 1978²⁴. Betapapun demikian, sebagian besar dari 50,000 pengungsi yang kembali ke Burma melakukannya tanpa sadar, dan UNHCR sulit melacaknya setelah mereka tiba²⁵.

Pada 1994, UNCHR mendirikan kantor kecil di Negara Bagian Arakan, pada saat terjadi tambahan jumlah pengungsi Rohingya yang dipaksa pulang ke Burma oleh otoritas Bangladesh. Saat bersamaan, UNHCR mempromosikan pemulangan massal dengan alasan situasi di Negara Bagian Arakan kondusif untuk kembali, meski kemudian Human Rights Watch mencatat pengungsi yang kembali ini melakukannya tidak dengan sukarela²⁶. Upaya ini ditandai dengan penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk pembunuhan, oleh aparat keamanan Bangladesh dan pasukan Burma yang menerima Rohingya²⁷. Pada 1995, beberapa

²³ Human Rights Watch, *The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, vol.8, no.8, September 1996.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., p. 5.

²⁷ Human Rights Watch, *The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, vol.8, no.8, September 1996; U.S. Committee for Refugees, “The Return of the Rohingya Refugees to Burma: Voluntary Repatriation or Refoulement?” Washington, DC, 1995.

dari mereka yang kembali dijamin Kartu Registrasi Sementara (TRC), yang hanya memberi hak-hak terbatas untuk bergerak dan bekerja di kawasan utara Negara Bagian Arakan.

Sejak itu, ribuan orang Rohingya di Negara Bagian Arakan, yang terampas haknya dan tanpa kewarganegaraan, bertahan hidup dengan bantuan kemanusiaan dari badan-badan internasional dan Program Pangan Dunia PBB, menyelamatkan diri dari penindasan brutal Nasaka, petugas penjaga perbatasan Burma yang beranggotakan tentara angkatan darat, polisi, petugas imigrasi, dan bea cukai. Nasaka memiliki penegakan hukum, militer, dan otoritas pemerintahan di kotamadya berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan utara Negara Bagian Arakan, membuatnya berperan menjadi kesatuan khusus dari semua kawasan Burma. Nasaka secara rutin mewajibkan kepada warga Rohingya untuk kerja paksa, dan tahun lalu saja Nasaka menahan sewenang-wenang antara 2,000 hingga 2,500 warga Rohingya karena “pelanggaran” seperti memperbaiki rumah tanpa izin. Mereka yang ditahan seringkali dipukul dan disiksa, dan mereka boleh bebas asalkan membayar uang ke komandan Nasaka, biasanya melewati para calo atau perantara.²⁸

Setiap tahun, ribuan Rohingya tanpa status warga negara—mendarikan diri dari penindasan dan penyiksaan di kawasan utara Negara Bagian Arakan serta dilarang bepergian lewat jalur darat di Burma—mengambil risiko dalam perjalanan berbahaya lewat jalur laut menuju Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Perjalanan ini sering berakhir kekerasan dan eksploitasi akibat perdagangan manusia, memaksa mereka kembali mengarungi lautan, dan penahanan tak tentu dan berkepanjangan di negeri asing²⁹. Ratusan ribu Rohingya bekerja secara ilegal di Malaysia, Thailand, dan Timur Tengah, atau mencari suaka di beberapa negara.

Ribuan warga Arakan juga terperangkap dalam penyiksaan dan kemiskinan di Burma serta hidup di luar negeri sebagai pekerja tanpa dokumen sebagai pencari suaka di India, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Karena kemudahan mereka bepergian dengan bebas di Burma, warga Arakan jarang sekali bergabung dalam perjalanan laut marabahaya sebagaimana warga Rohingya.

²⁸ Wawancara Human Rights Watch #15, Yangon, Burma, Juni 2012.

²⁹ Lihat Human Rights Watch, *Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas*, Mei 2009.

II. Kekerasan di Negara Bagian Arakan sejak Juni 2012

Kekerasan sektarian di Negara Bagian Arakan terutama berlangsung dari 8 Juni hingga 12 Juni 2012, saat massa Arakan dan Rohingya saling menyerang rumah, toko, dan tempat ibadah. Para saksi mata menuturkan massa dari kedua penduduk menyerbu lingkungan tetangga, menjarah dan membakar rumah dan bangunan lain, serta saling memukul dengan senjata keras, seperti parang, tongkat bambu, batang besi, dan tonggak. Sejumlah orang dari kedua komunitas mengakui pada Human Rights Watch bahwa mereka sendiri bertanggung-jawab atas aksi kekerasan, termasuk pembunuhan.

Pasukan keamanan Burma beroperasi secara independen dan, dalam beberapa kasus, bersama-sama dengan penduduk Arakan bersenjata yang merespon kekerasan dengan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini, dijelaskan di bagian berikutnya, terjadi terutama sejak 10 Juni dan sesudahnya di Sittwe dan di kawasan utara Negara Bagian Arakan terhadap penduduk Rohingya.

Penyebab langsung kerusuhan dapat ditelusuri pada serangkaian insiden kekerasan, dimulai pada 28 Mei saat pemerkosaan dan pembunuhan Thida Htwe, 27 tahun, perempuan beragama Budha etnis Arakan, di Ramri, kawasan selatan Negara Bagian Arakan, diduga oleh tiga pria Muslim. Pada 3 Juni, sebagai reaksi yang disulut pamflet yang mengobarkan amarah, beredar di kalangan warga lokal, berisi rincian pemerkosaan dan pembunuhan, sekelompok besar penduduk Arakan di kota Toungop, sebelah tenggara dari Ramri, menghentikan sebuah bus dan memukul serta membunuh sepuluh orang Muslim langsung di tempat kejadian. Pada saat serangan terhadap bus, tiga pria Muslim yang diduga terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan ditahan oleh pihak berwenang di Kyaukphu, dekat Ramri. Tiga orang ini kemudian dinyatakan bersalah atas kejahatan mereka. Seorang tersangka dikabarkan melakukan bunuhdiri di tahanan, sementara dua lainnya divonis hukuman mati pada 18 Juni. Sebaliknya, tidak ada tindakan terkait pembunuhan 10 orang Muslim di Toungop, meski ratusan saksi melihat penyerangan tersebut.

Pada 8 Juni, ribuan Muslim di kota Maungdaw di kawasan utara Negara Bagian Arakan melakukan kerusuhan setelah ibadah shalat Jumat, menghancurkan properti penduduk Arakan dan membunuh warga Arakan, yang belum pasti berapa jumlahnya. Kekerasan

dengan cepat menjalar ke Sittwe, ibukota Negara Bagian Arakan, di mana massa Rohingya dan Arakan menyerang satu sama lain. Dalam sejumlah kasus, kelompok yang satu menyerang kampung-kampung yang tak diduga bakal terkena amukan massa.

Pada 10 Juni, Presiden Burma, Thein Sein, menyatakan negara dalam keadaan darurat di kotamadya Sittwe, Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung, memberi kewenangan pada pasukan militer Burma untuk campur-tangan dalam kekerasan sektarian. Selagi kekerasan bergerak di Sittwe dalam beberapa hari, di wilayah utara Negara Bagian Arakan, aparat keamanan mulai melakukan pelanggaran serius, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan berlebihan selama penyisiran massal terutama di kampung-kampung penduduk Rohingya. Lebih dari 100,000 Rohingya dan Arakan mengungsi dan hidup terpencar di kamp-kamp penampungan darurat yang didirikan organisasi kemanusian lokal dan internasional yang segera memberikan bantuan darurat.

Belum pasti berapa jumlah korban tewas dan luka-luka akibat kekerasan sektarian dan penyisiran massal sepanjang kawasan utara Negara Bagian Arakan. Pemerintah secara resmi menaksir korban tewas berjumlah 62 orang³⁰. Investigasi Human Rights Watch mengindikasikan angka itu terlalu rendah³¹.

Pada 12 Juli, sekitar sebulan setelah kekerasan meletus, Thein Sein mengumumkan bahwa “satu-satunya solusi” mengirim warga Rohingya ke negara lain atau ke kamp-kamp pengungsi yang dikelola lembaga UNHCR.³² Lembaga PBB yang mengurus pengungsi dunia ini langsung menolak usulan tersebut.³³

Dari 27 Juni hingga 1 Juli, tiga anggota komisi nasional hak asasi manusia Burma—dipimpin ketuanya, Win Mra, etnis Arakan—mengunjungi Negara Bagian Arakan untuk menilai situasi. Temuannya dipublikasikan dalam pernyataan di media pemerintah pada

³⁰ Lihat, sebagai contoh, “Myanmar Official says 62 died in recent communal unrest,” *Washington Post* (Associated Press), 21 Juni 2012, www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/myanmar-official-says-62-died-in-recent-communal-unrest-in-the-west/2012/06/21/gJQA876fsV_story.html (diakses 13 Juli 2012).

³¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.E., Z.F., A.A., dan D.F. menyatakan sedikitnya korban terbunuh 90 orang.

³² “Myanmar moots camps, deportation as Rohingya ‘solution,’” *Agence France Presse*, 12 Juli 2012, <http://www.rnw.nl/english/bulletin/myanmar-moots-camps-deportation-rohingya-solution-o> (diakses 13 Juli 2012).

³³ “UN Refugee Chief Rejects Call to Resettle Rohingya,” *Associated Press*, 12 Juli 2012, http://abcnews.go.com/International/wireStory/refugee-chief-rejects-call-resettle-rohingya-16762724#.T_RvHBVekl (diakses 13 Juli 2012).

11 Juli, menyatakan atas nama komisi bahwa tak ada pelanggaran pemerintah, mengklaim semua kebutuhan kemanusiaan dipenuhi, dan kegagalan mengatasi kewarganegaraan dan persekusi Rohingya.³⁴

³⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar, “Statement No. (4/2012) of Myanmar National Human Rights Commission concerning incidents in Rakhine State in June 2012,” *The New Light of Myanmar*, 11 Juli 2012.

III. Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan Negara

Pemerintah Gagal Melindungi Korban dari Kekerasan Sektarian

Selama puncak kekerasan sektarian dari 8 Juni hingga 12 Juni di Sittwe dan kawasan utara Negara Bagian Arakan, sejumlah penduduk dari Arakan dan Rohingya melakukan aksi kekerasan yang mengerikan dan menghancurkan properti. Laporan-laporan menyebutkan terjadi pemenggalan kepala, penikaman, penembakan, pemukulan dan pembakaran yang menyebar luas. Para saksimata dari kedua komunitas berkata pada Human Rights Watch bahwa tak ada perlindungan dari pihak berwenang saat itu, meski situasnya begitu genting.³⁵ Kegagalan pemerintah mencegahnya secepat mungkin berkontribusi pada eskalasi kekerasan selanjutnya, yang melibatkan serangan terencana dan terkoordinasi oleh kedua komunitas dalam situasi tunahukum. Bahkan dengan memperhatikan serangan awal pada 3 Juni terhadap penumpang bus warga Muslim oleh massa Arakan di Toungop, polisi dan serdadu militer cuma menyaksikan pembunuhan itu dan tak mencegahnya.³⁶ Seorang saksi mengatakan pada Human Rights Watch bahwa pihak berwenang hanya bertindak saat mengumpulkan mayat.³⁷

Meski banyak laporan mengenai kegagalan aparat keamanan melindungi warga Arakan, Rohingya, dan Muslim non-Rohingya pada awal huru-hara, Human Rights Watch mengamati kesatuan tentara Burma, yang ditugaskan pemerintah untuk menjaga ketertiban, memainkan peran positif dalam menangkal kekerasan di ibukota Sittwe, pada akhir Juni selama kunjungan kami ke kota tersebut. Namun, pasukan keamanan lain, terutama aparat polisi dan paramiliter lokal, bertanggung-jawab atas sejumlah pelanggaran di Sittwe dan kawasan utara Negara Bagian Arakan terhadap warga Rohingya. Human Rights Watch menyaksikan tentara angkatan darat mengawal warga Rohingya melewati Sittwe pada akhir Juni untuk mengumpulkan barang-barang sebelum kembali ke kamp pengungsitan—betapapun kami tak bisa memastikan apakah itu bagian dari tugas

³⁵ Pembunuhan terhadap 10 penumpang Muslim di Toungop pada 3 Juni dan kerusuhan yang dilakukan sekelompok besar warga Muslim di Maungdaw diikuti dengan peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bias liputan media Burma yang dalam beberapa hal memusuhi secara terbuka warga Muslim dan Muslim non-Rohingya. Sebagai contoh, dalam liputan mengenai pembunuhan itu, *The New Light of Myanmar* merujuk Muslim yang dibunuh itu dengan istilah merendahkan “Kalar.” Ini bikin marah sekali Muslim Burma, beberapa yang bicara pada Human Rights Watch menginterpretasi pernyataan itu sebagai indikasi jelas bahwa umat Muslim dipandang sebagai “warga kelas dua.” *The New Light of Myanmar* kemudian mengubah pemakaian istilah itu tapi tak minta maaf sebelumnya. Wawancara Human Rights Watch #01, Yangon, Burma, Juni 2012.

³⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan D.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

³⁷ *Ibid.*

normal atau dibayar. Seorang Rohingya berkata pada Human Rights Watch, “Polisi orang Arakan. Mereka membenci kami. Tentara orang Burma. Mereka melindungi kami.”³⁸

Kekerasan Rohingya terhadap Arakan

Seorang perempuan Arakan, dengan lima anak, berkata pada Human Rights Watch bahwa sekelompok besar Rohingya, beberapa membawa pistol, memasuki kampungnya dekat Sittwe sekira 12 Juni dan membunuh suaminya. Dia bilang tak ada aparat keamanan di kampungnya:

Suami saya dibunuh dua minggu lalu tapi saya tidak tahu tanggal persisnya. Pertama orang Muslim (yang datang) memakai senapan. Pada saat itu, kami mendengar tembakan dan suami saya berusaha menyerang orang Muslim. Mereka membunuhnya di sana di kampung. Tangannya dipotong dan kepalanya nyaris putus. Dia berusia 35 tahun.³⁹

Perempuan Arakan berusia 40 tahun, dari kampung Banphu sekitar Sittwe berkata pada Human Rights Watch bahwa sekelompok besar Muslim mendatangi kampungnya pada pertengahan malam pada 11 Juni, memakai baju besi yang dibuat sendiri dari plastik tebal. Mereka membawa parang dan satu liter botol berisi bensin yang mereka pakai membakar rumah. Tak ada aparat keamanan. Dia bertutur:

Saya jatuh dan tidak bisa bernafas, saya sangat takut. Saya melihat semua kekerasan. Sekitar 300 Muslim datang untuk menyerang kampung kami. Mereka datang dan membakar rumah. Saya melihat mereka membakar rumah.... Polisi tidak datang saat kekerasan terjadi. Ketika orang-orang Muslim datang dan membakar rumah, saya lari. Saya baru melihat polisi setelah tiba di Sittwe.⁴⁰

Seorang perempuan Arakan, 49 tahun, menuturkan pada Human Rights Watch bahwa tiadanya perlindungan sama sekali dari pihak berwenang membuat ratusan Rohingya menyerang kampungnya, yang datang dari luar Sittwe, pada 10 Juni. Dia berkata:

³⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

³⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan C.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁴⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan C.B., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Mereka melempari kami batu dengan ketapel. Mereka membawa pisau dan tongkat, tapi kami cuma 40 orang. Jumlah [Rohingya] begitu banyak. Kami tidak bisa melawan jadi kami berlarian dan mereka membakar rumah kami. Ada delapan rumah dan dua biara yang mereka hancurkan. Ada begitu banyak orang Muslim, kami tidak bisa membela diri. Mereka berusaha menangkap kami dan memotong kami dengan pisau. Mereka datang dari Sittwe.⁴¹

Kegagalan negara melindungi perkampungan sesegera mungkin dari serangan telah memicu kekerasan oleh sejumlah penduduk dari kedua komunitas, yang mendorong mereka main hakim sendiri. Seorang pria Arakan berusia 40 tahun di Sittwe bicara pada Human Rights Watch, “Pemerintah tidak membantu kami. Kami tidak punya makanan, tidak ada penampungan, dan tak ada jaminan keamanan [saat kami mengungsi], tapi kami melindungi diri kami dengan tongkat dan pisau. Kami tidak bisa tidur nyenyak sejak saat itu.”

Kekerasan Arakan terhadap Rohingya

Beragam media lokal dan yang dikendalikan negara di Burma mengakui kekerasan di Negara Bagian Arakan hanya dilakukan Rohingya terhadap Arakan, sementara media internasional berfokus pada kekerasan terhadap Rohingya.⁴² Grup Eleven Media yang dikenal independen berkata dalam sebuah pernyataan: ”Media asing kini menyajikan laporan bias tentang bentrokan antara orang [Arakan] dan Rohingya Benggala untuk menghancurkan citra [Burma] dan masyarakatnya.... Hanya orang Rohingya yang dibunuh orang [Arakan] dan rumahnya dibakar.”⁴³

Human Rights Watch menemukan kekerasan yang meningkat antara kedua komunitas kian terorganisir dalam penyerangan satu sama lain. Pria Arakan, 45 tahun, dari Sittwe berkata pada Human Rights Watch bahwa dia berperan dalam pertemuan lokal di Sittwe sebelum 11 Juni yang menentukan keputusan bersama untuk membakar perkampungan Muslim sekitar Sittwe. Dia bilang:

⁴¹ Wawancara Human Rights Watch dengan A.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁴² Lihat Hannah Hindstrom, “The Freedom to Hate,” *Foreign Policy*, 14 Juni 2012, http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/14/the_freedom_to_hate (diakses 16 Juli 2012).

⁴³ Grup Eleven Media, “Biased reporting of foreign media of Rakhine-Rohingya issue disgraces Myanmar images,” Juni 2012, http://eversion.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=602:bias-reporting-of-foreign-media-on-rakhine-rohingyas-disgraces-myanmar-images&catid=42:weekly-eleven-news&Itemid=109 (diakses 16 Juli 2012).

Kami membahas dan memutuskan membakar beberapa kampung [Rohingya] yang menjadi tempat kebanyakan Muslim menetap. Contohnya, Narzi dan Bhumi. Pertama kami mulai membakar kampung Bhumi, markas besar orang Muslim. Kami membakar rumah-rumah dan kemudian mereka membalaunya dengan membakar rumah kami. Di beberapa daerah, kami tidak membakar rumah. Itu akan terlihat bodoh bila kita membakar beberapa daerah yang kebanyakan rumahnya bertetangga dengan rumah orang Arakan. Mereka semua akan terbakar. Serangan itu berlangsung tiga hari. Dimulai dekat kampung Bhumi dekat Universitas Sittwe karena Bhumi adalah markas besar mereka.⁴⁴

Selama kampanye ini, yang digambarkan warga lokal sebagai tindakan “mempertahankan diri,” penegakan hukum absen sama sekali untuk mencegah pembakaran di Sittwe.

Serangan tampaknya direncanakan untuk menghadirkan kerusakan maksimum pada komunitas Rohingya, di sisi lain tidak merugikan rumah-rumah orang Arakan. Para saksi Rohingya membenarkan massa Arakan tidak membakar rumah yang berdekatan dengan rumah Arakan tapi memakai sarana destruktif alternatif. Pria paruh baya Rohingya berkata pada Human Rights Watch:

Tempat kami tinggal terpisah, Arakan membakar rumah-rumah Muslim. Tapi di tempat yang berbaur dengan Arakan, mereka tidak membakar karena api akan menyebar, jadi mereka hanya pakai kekerasan. Mereka memukul dan membunuh dan menghancurkan rumah dengan cara lain.⁴⁵

Beberapa orang Rohingya berkata tiadanya keamanan selama puncak kekerasan sektarian memberi kesempatan pada pembunuhan tanpa hambatan dan kekerasan lain. Perempuan Rohingya di Sittwe, 38 tahun, bilang pada Human Rights Watch bahwa pada 11 Juni sekitar 50 pria Arakan bersenjata mengepung rumahnya saat dia dan keluarnya berada di dalam. Dia menuturkan:

⁴⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan B.G., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁴⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan A.Z., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012

Mereka menunjuk rumah kami dan berkata, “Ini rumah seorang Muslim,” dan kemudian 10 pria datang ke lantai atas. Saat mereka datang ke lantai atas, adik ipar saya melompat lewat jendela. Saat dia lompat, orang-orang di luar menangkap dan membunuhnya [dengan menyayat tenggorokannya]. Saya bersembunyi di bagian belakang rumah. mereka terus datang dan mendobrak pintu. Pintu kamar tempat kami bersembunyi sangat kuat. Mereka tak bisa mendobraknya. Mereka bilang, “Kamu mau keluar atau terbakar sampai mati, pilih mana?”⁴⁶

Dia bilang pada Human Rights Watch bahwa suaminya menelepon polisi tapi mereka gagal mengatasinya. Dia berkata, “Sejak suami saya sebagai pengusaha, dia rajin mengontak polisi, jadi dia terus menelepon dan mengabarkan ada orang yang mengancam di luar rumah kami. Dia terus-menerus menelepon tapi polisi tak datang.”⁴⁷ Dia bilang massa memukulnya dan suaminya, bapak mertuanya, dua pembantu, dan seorang tetangga, semua orang di rumahnya. Penyerang menjarah rumahnya dan akan membunuh mereka, dia berkata, sementara seorang tetangga Arakan tidak campur tangan untuk hentikan massa.

Massa membawa mereka ke kantor polisi dan memukuli mereka sepanjang jalan. “Saat kami di sana, ada 200 sampai 300 polisi. Beberapa teman suami saya. Dia bertanya, “Mengapa kamu tak melindungi kami?” Polisi itu menjawab, “Kami tak diberi perintah untuk mengambil tindakan. Kami menunggu perintah.”⁴⁸

Perempuan ini dan suaminya bercerita bahwa mereka melihat pengusaha toko lokal secara terbuka membagi-bagikan batang besi dan tombak pada warga lokal Arakan pada 10 Juni. Dia berkata:

Saya melihat seorang wanita membagikan tombak besi tajam dan juga memberi batang besi. Mereka berada satu inci di sekitar saya. Saya melihatnya [dari rumah] sebelum mereka datangi rumah. Saya melihatnya berulang kali. Saya tidak ingat berapa banyak orang [memegang senjata] tapi saya melihatnya di mana-mana. Pemilik toko membiarkan mereka.⁴⁹

⁴⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Persekongkolan antara Arakan dan Aparat Keamanan Lokal

Penduduk di Sittwe dan kawasan utara Negara Bagian Arakan berkata pada Human Rights Watch, mereka menyaksikan penduduk Arakan bersenjata tongkat, parang, tombak, batang besi, dan pisau berjalan bersama-sama dengan polisi yang kemudian melakukan prakarsa kekerasan setidaknya dari 10 Juni sampai sesudahnya.

Seorang pria Rohingya, 36 tahun, dari Narzi, daerah di seperempat Sittwe, berkata pada Human Rights Watch:

Kampung saya sendiri dibakar dan dihancurkan. Polisi datang dan saya melihatnya, mereka bercampur dengan warga Arakan. Mereka menyerang kampung dan rumah saya. Beberapa warga Arakan menyerang rumah kami dan membakarnya, dan polisi cuma berdiri menonton. Polisi tak menghentikan mereka. Saya melihat banyak penduduk melarikan diri. Warga Arakan menyerang dengan pisau dan batang kayu.⁵⁰

Pria 26 tahun Rohingya bicara pada Human Rights Watch, dia memperkirakan serangan ini bertalian dengan aksi balasan dari kerusuhan yang dilakukan warga Rohingya di Maungdaw pada 8 Juni, ketika ribuan Rohingya menghancurkan properti Arakan dan membunuh sejumlah warga Arakan yang tak diketahui berapa pastinya. Dia berkata, “Saya melihat beberapa [polisi/aparat keamanan polisi] dan mereka datang ke daerah kami dengan orang Arakan yang membakar rumah-rumah kami. Mereka melakukannya dengan leluasa. [Polisi/aparat keamanan] bersama mereka.”⁵¹

Di Maungdaw, penduduk menuduh anak muda Arakan dan pasukan keamanan bekerjasama dalam kekerasan. Seorang saksi tentang pelanggaran itu menuturkan pada Human Rights Watch:

Saya melihat beberapa anak muda Arakan dengan pedang dan parang panjang berjalan bersama penegak hukum—Nasaka dan polisi. Anda bisa melihat mereka berkeliling di satu truk, pemuda Arakan dengan polisi dalam satu truk, beberapa dengan perlengkapan yang dibuat sendiri. Anda takkan melihat seorangpun warga Muslim di jalanan saat itu, dan sepanjang malam

⁵⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan A.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁵¹ Wawancara Human Rights Watch dengan A.B., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Anda takkan melihat sama sekali warga Muslim. Malahan kami melihat banyak Nasaka dan anak muda Arakan, dan kami mendengar banyak tembakan. Rupanya hal itu membuat warga Muslim kembali. Arakan berkata kampung diserang sekelompok Muslim, dan Nasaka bersenjata.... Kami melihat empat atau lima anak muda berjalan dengan parang bersama empat atau lima [serdadu Nasaka]. Kami bisa melihat kampung terbakar. Kami bisa melihat asapnya. Kami bisa mendengar tembakan. Kami tak tahu siapa yang menembak mereka. Penembakan tak lama. Cuma sekitar semenit atau dua menit. Kebanyakan tidak intensif. Mungkin saja sebuah tembakan, berikutnya tembakan lain, dan pada waktu lain tembakan cepat.⁵²

Di seluruh Negara Bagian Arakan, pasukan keamanan secara konsisten gagal melindungi komunitas Rohingya dari serangan mematikan. Pria Rohingya, 65 tahun, berkata pada Human Rights Watch bahwa kedua adik iparnya ditikam hingga tewas di pinggir Jalan Raya Htee Twan dan Aung Than di Sittwe pada 10 Juni. Dia berujar, “Mereka dibunuh warga Arakan di depan saya. Polisi ada di sana. Kejadiannya tidak jauh dari polisi. Mereka dibunuh di depan saya dan polisi membiarkan.”⁵³

Pembunuhan oleh Aparat Keamanan

Aparat keamanan bertanggung-jawab atas pembunuhan sejumlah warga Rohingya pada bulan Juni di Sittwe dan kawasan utara Negara Bagian Arakan.

Seperempat daerah Narzi di Sittwe, terbesar dan paling penting secara ekonomi bagi tetangga Muslim di ibukota dan tempat bagi sekira 10,000 Muslim dan 300 Arakan, dihancurkan besar-besaran pada 12 Juni. Sekelompok warga Rohingya membakar bagian kecil daerah Arakan di Narzi, sementara sekelompok Arakan melancarkan apa yang tampaknya menjadi serangan terkoordinasi di bagian besar daerah Narzi, membakarnya hingga rata dengan tanah. Para saksi Rohingya berujar polisi dan paramiliter Lon Thein—unit terlatih khusus yang menangani kerusuhan, penampilannya dibedakan dengan syal merah—menembaki warga Rohingya saat berusaha memadamkan api yang dilakukan kelompok Arakan.

⁵² Wawancara Human Rights Watch dengan A.E., Yangon, Burma, Juni 2012.

⁵³ Wawancara Human Rights Watch dengan C.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Pria Rohingya, 36 tahun, menuturkan pada Human Rights Watch:

Mereka [Arakan] mulai membakar rumah-rumah. Saat orang-orang berusaha memadamkan api, paramiliter menembaki kami. Dan kelompok itu memukul orang dengan tongkat besar.... Kami mengumpulkan 17 mayat dibantu beberapa pihak berwenang [tentara].... Saya hanya mengenali satu mayat. Namanya Mohammad Sharif. Dia berusia 28 tahun.... Kami mengambil jenazahnya. Kami menaruhnya di truk militer. Sekali saya melihat dengan jelas, peluru menembus dada kiri dia.⁵⁴

Pria Rohingya 28 tahun dari Narzi berujar:

Di depan mata saya, pertama-tama Lon Thein datang dan bilang mereka datang untuk melindungi kami, tapi saat Arakan datang dan membakar rumah, kami berusaha memadamkan api dan mereka mulai memukul kami. Banyak orang ditembak [oleh Lon Thein] dengan jarak dekat. Saya melihat orang ditembak dalam jarak dekat. Semua penduduk menyaksikannya. Mereka dari kampung saya. Mereka berjarak 15 atau 20 kaki dari saya.... Saya melihat sedikitnya 50 orang dibunuh... Ketika kami berusaha memadamkan api, kami tak dibolehkan. Pertama mereka melepaskan tembakan ke udara, dan kemudian ke kerumunan orang.⁵⁵

Pria Rohingya, 36 tahun, yang lari dari Narzi pada 12 Juni bercerita pada Human Rights Watch:

Pada sore 12 Juni, saya melihat polisi membunuh beberapa orang. Saya menyaksikannya. Saya hanya beberapa kaki dari mereka. Saya sedang di jalan. Saya melihat mereka menembaki sedikitnya enam orang—seorang perempuan, dua anak-anak, dan tiga pria. Polisi mengambil mayat mereka... Saat kami berusaha mempertahankan rumah kami dan memadamkan api, mereka menembaki kami.”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.E., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁵⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁵⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan A.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Di kawasan utara Negara Bagian Arakan, para saksi Rohingya mengungkapkan bagaimana aparat keamanan melancarkan penyisiran dengan cara kekerasan, menembaki penduduk yang berlarian, membunuh apa yang mereka sebutkan lusinan Rohingya dan lusinan lebih luka-luka. Pria Rohingya 22 tahun menuturkan apa yang dia lihat selagi dia lari dari aparat keamanan yang memasuki kampung Kampu pada 26 Juni:

Nasaka [pasukan perbatasan] menembaki kelompok orang dan 17 orang tertembak saat penyisiran. Kami lari ke jalan, yang saat itu hujan sangat lebat. Kami terus lari dari kampung dan menerobos hujan di jalan dan mereka menembaki kami. Saya melihat 17 orang tertembak dan 9 dari mereka remaja dan anak muda. Polisi dari Maungdaw, Lon Thein, dan Nasaka terlibat dalam penyisiran... Mayat mereka tergeletak di jalan. Saya tak tahu apa yang terjadi pada mereka karena saya terus lari dari penangkapan. Suara peluru berdesing terus-menerus.⁵⁷

Penangkapan Massal terhadap Rohingya

Pada Juni 2012, Human Rights Watch bicara dengan tujuh warga Rohingya dari kawasan utara Negara Bagian Arakan yang kabur dari penyisiran brutal oleh aparat keamanan segera sesudah meledak kekerasan sektarian. Mereka menguraikan pada Human Rights Watch operasi keamanan skala luas di mana polisi, Lon Thein, Nasaka, dan tentara Angkatan Darat Burma secara sistematis menyisir dari desa ke desa seputar kotamadya Maungdaw untuk menangkap penduduk dan membawanya ke lokasi tak diketahui. Dalam beberapa kasus, pasukan keamanan datang dengan daftar orang-orang yang dituduh terlibat dalam kerusuhan Rohingya di Maungdaw antara 8-10 Juni. Menurut penuturan pria Rohingya, 27 tahun:

Militer datang dan bicara pada kepala dusun dan menyuruhnya memberi nama-nama orang yang ikut terlibat dalam kekerasan. Mereka datangi rumah demi rumah, pintu ke pintu, mengambil penduduk. Mereka yang ada dalam daftar... Tak seorang pun tahu di mana mereka sekarang, dan mereka yang tak ada dalam daftar bisa bebas jika membayar uang.”⁵⁸

⁵⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan D.F., Maungdaw, Negara Bagian Arakan, 27 Juni 2012.

⁵⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan D.D., Bangladesh, 28 Juni 2012.

Human Rights Watch menerima laporan konsisten tentang penangkapan massal yang dilakukan di kota Maungdaw dan kampung-kampung yang lebih terpencil di selatan Maungdaw antara 12-24 Juni. Para saksi menuturkan bagaimana aparat keamanan negara menyerang dengan brutal kebanyakan kampung Rohingya di kotamadya Maungdaw, menembaki penduduk dan membakar rumah serta toko. Pemuda Rohingya, 17 tahun, menceritakan bagaimana dia menyaksikan sejawatnya berusia 17 dan 18 tahun ditahan serta anak berumur 8 tahun.⁵⁹

Sementara persekongkolan antara aparat keamanan dan warga Arakan terjadi selama kekerasan sektarian pada awal Juni, saksi-saksi juga menggambarkan anggota komunitas Arakan meneman pasukan keamanan selama penggeledahan dan penangkapan massal berikutnya pada bulan itu, kadang-kadang ikut dalam serangan terhadap warga Rohingya. Pria Rohingya, 27 tahun, dari Kotamadya Maungdaw berkata pada Human Rights Watch:

Duapuluhan lima saudara saya ditangkap.... Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dua keponakan laki-laki saya diciduk militer dan Nasaka. Mereka berusaha bersembunyi di tanggul besar di sawah, tapi beberapa warga Arakan menemukan mereka dan menikamnya dengan pisau panjang. Mereka menikam dan membawanya ke penjara.⁶⁰

Lokasi tempat mereka ditangkap di kawasan utara Negara Bagian Arakan, kebanyakan tak diketahui. Sejumlah anggota keluarga dari mereka yang ditahan berujar pada Human Rights Watch bahwa mereka tak mendengar kabar saudaranya sejak aparat keamanan mengangkatnya ke truk dan membawa pergi. Kawasan utara Negara Bagian Arakan memiliki beberapa basis Nasaka dan, mengingat sejarah kekerasan aparat Nasaka terhadap penduduk Rohingya, ada keprihatinan serius tentang keselamatan dan tahanan yang mungkin dibawa ke basis-basis tersebut.⁶¹ Sementara lokasi persisnya tak diketahui, seorang penduduk Maungdaw menjelaskan dia melihat sebuah truk penuh dengan warga Rohingya yang ditangkap, dibawa dari Maungdaw ke arah Butidaung, tempat sebuah penjara besar berada. Dia berujar:

⁵⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan D.H., Bangladesh, 28 Juni 2012.

⁶⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan D.D, Bangladesh, 28 Juni 2012.

⁶¹ Untuk membahas pelanggaran masa lalu terhadap Rohingya di Burma dan perilaku Nasaka, lihat Human Rights Watch, *Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas*, 26 Mai 2009; Human Rights Watch, *Malaysia/Burma: Living in Limbo: Burmese Rohingyas in Malaysia*, Augustus 2000; Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, September 1996.

Mereka menangkap orang dari Thanda, Kampu, dan Wassa dan mereka dibawa ke kota Maungdaw, saya melihat mereka datang ke kota dengan truk Nasaka. Mereka dibawa ke Maungdaw dan kemudian ditempatkan di penjara Buthidaung dan beberapa di kantor polisi.⁶²

Pada akhir Juni, di kota pesisir selatan Moulmein, 82 orang Rohingya yang melarikan diri dikabarkan ditangkap dan divonis setahun penjara karena melanggar undang-undang imigrasi.⁶³

Pengerahan Kekuatan Berlebihan dan Tak Perlu oleh Aparat Keamanan

Sementara kekerasan sektarian di Sittwe dan sekitarnya sebagian besar terjadi pada 12 Juni, penduduk kawasan utara Negara Bagian Arakan berkata pada Human Rights Watch bahwa aparat keamanan mengerahkan kekuatan yang mengabaikan hukum dalam melancarkan operasi keamanan skala luas di Maungdaw dan sekitar perkampungan. Penduduk Maungdaw menceritakan mereka tak bisa meninggalkan rumah untuk ke pasar membeli makanan atau bergerak dengan bebas sekitar kota karena takut diserang oleh aparat keamanan. Seorang penduduk berujar pada Human Rights Watch, “Kami bersembunyi di rumah kami, ketika kami pergi keluar, mereka menembak. Tentara Angkatan Darat dan Lon Thein berjaga-jaga di depan dan di belakang desa kami.”⁶⁴ Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum menetapkan aparat penegak hukum harus, se bisa mungkin, menggunakan cara-cara nonkekerasan sebelum beralih menggunakan kekuatan. Ketika penggunaan kekuatan sesuai hukum tak bisa dihindarkan, petugas penegak hukum harus menahan diri dalam melaksanakannya dan bertindak proporsional sesuai ancaman serangan dan tujuan yang ingin dicapai dan meminimalisir kerusakan dan cedera. Kekuatan mematikan hanya boleh digunakan saat ada ancaman kekerasan yang membahayakan jiwa dan benar-benar diperlukan.⁶⁵

⁶² Wawancara Human Rights Watch dengan D.E., Maungdaw, Negara Bagian Arakan, 25 Juni 2012.

⁶³ Lawi Weng, “Rohingya Boatpeople Sentenced to Immigration Charges,” The *Irrawaddy*, 22 Juni 2012, <http://reliefweb.int/report/myanmar/rohingya-boatpeople-sentenced-immigration-charges> (diakses 26 Juli 2012).

⁶⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan D.E., Maungdaw, Negara Bagian Arakan, 25 Juni 2012.

⁶⁵ Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum, Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum, 27 Agustus hingga 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990).

Aparat keamanan secara rutin melakukan pemukulan brutal selama penangkapan dan serangan ke perkampungan. Beberapa yang dipukul dikabarkan meninggal. Pemuda Rohingya, 17 tahun, bertutur:

Mereka [aparat keamanan] menangkap orang yang lebih tua dan memukul anak-anak muda. Mereka mengikat lengan ke belakang dan kemudian menendang dengan sepatu bot. Saat mereka mengikat, mereka menginjak dan memukulnya dengan gagang senapan. Hanya ketika mereka sudah babak-belur, mereka melepaskannya.⁶⁶

Di kampung yang sama, warga Rohingya lain, 27 tahun, berkata pada Human Rights Watch bahwa pada 27 Juni tentara-tentara dan Nasaka menyerang dengan kejam dan memerkosa bibinya dan dua perempuan lain:

Mereka berusaha merampas perhiasan emas yang dia pakai, anting-anting dan cincin di hidung, tapi dia tak membiarkan. Kemudian mereka memotong cuping telinga dan lubang hidung dengan pisau. Saat dia berusaha menghentikan, mereka merobek blus dia dan memerkosanya. Duabelas tentara dan Nasaka memasuki sebuah rumah dan mereka memerkosa perempuan.⁶⁷

Pelanggaran Hak Beragama

Selama dan setelah bentrokan bulan Juni, warga Rohingya menyerang candi Budha Arakan dan dibalas serangan warga Arakan terhadap masjid Muslim Rohingya. Otoritas juga mencegah Muslim menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam, dan beberapa mayat diduga dikremasi. Sedikitnya satu kasus terjadi serangan terhadap rumah ibadah setelah mayoritas penghancuran properti pada awal Juni. Seorang pria Rohingya menceritakan pada Human Rights Watch mengenai serangan sebuah masjid di Sittwe pada pagi 29 Juni yang, hingga saat itu, belum dipengaruhi kekerasan sektarian. Dia berkata:

⁶⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan D.H., Bangladesh, 28 Juni 2012.

⁶⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan D.D., Bangladesh, 28 Juni 2012.

Beberapa orang [pegawai pemerintah lokal] menghancurkan masjid Rohingya di sudut Jalan Merchant dan Jalan Aung Htaw Oo. Itu masjid kami dan mereka merusaknya. Mereka adalah pemerintah dan pemadam kebakaran dan orang lain dari Sittwe. Mereka terus menghancurkan masjid.⁶⁸

Warga Rohingya di beberapa lokasi juga menuduh pihak berwenang yang mengawasi jenazah Rohingya yang dibunuh dalam kekerasan, secara efektif menolak mayat tersebut dikubur dengan layak.⁶⁹ Mereka berkata pada Human Rights Watch bahwa penolakan pemakaman warga Muslim secara pantas sudah sangat menyedihkan komunitas Muslim.

Setelah menyaksikan polisi menembak dan membunuh Rohingya di seperempat daerah Narzi, Sittwe, pada 12 Juni, pria Rohingya berumur 26 tahun berkata pada Human Rights Watch bahwa dia membantu mengumpulkan beberapa mayat Rohingya, menaruhnya ke truk militer. Dia berujar, “Mereka [tentara] mengizinkan kami mengambil beberapa mayat, tapi sebagian lain tak bisa dikumpulkan. Kebanyakan mayat Muslim dibawa pihak berwenang dan dibakar di pusat kremasi Budha. Tempat saya tinggal jauhnya kurang dari satu mil dari pemakaman itu. Kami bisa melihat api pembakaran [di pusat kremasi]. ”⁷⁰

Rohingya di kawasan utara Negara Bagian Arakan juga dikabarkan tak dapat membolehkan pemakaman sesuai ajaran Islam terhadap para korban kekerasan. Seorang penduduk Maungdaw menceritakan apa yang dia lihat:

Ketika kekerasan meletus pada 8 Juni, mayat-mayat ditumpuk dekat jembatan. Kami tak bisa mengambilnya, untuk dimakamkan sesuai ajaran agama. Bila ada seseorang melewati jembatan, dia masih dapat melihat mayat-mayat itu.⁷¹

⁶⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan C.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.E., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁷¹ Wawancara Human Rights Watch dengan D.C., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012

Pelanggaran Hak Tempat Tinggal, Relokasi Paksa, dan Pemulangan Para Pengungsi

Pemerintah Burma mengakui bertambahnya jumlah para pengungsi di Sittwe lebih parah dan akan makan waktu lama untuk menyelesaiannya ketimbang di tempat manapun di Negara Bagian Arakan.⁷² Demografis di Sittwe nyaris terbagi bahkan antara umat Budha dan umat Muslim, dengan jumlah keseluruhan sekitar 288,000 etnis Budha Arakan, Muslim Rohingya, dan Muslim non-Rohingya, selain himpunan kecil etnis China Kristen, Hindu, dan migran dari Bangladesh. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa pemerintah “menimbang sebuah perencanaan tatakota komprehensif yang dilakukan dalam jangka menengah” guna memecahkan masalah pengungsi di Sittwe.⁷³

Perusakan Properti

Kedua komunitas, Arakan dan Rohingya, sama-sama kehilangan properti yang begitu luas akibat kekerasan sektarian. Dampak ekonomi dari kerusahan ini akan kian menyengsarakan penduduk yang sudah miskin, termiskin kedua di Burma.⁷⁴ Beberapa pengungsi Arakan mengatakan pada Human Rights Watch bahwa mereka kehilangan semua barang-barangnya karena dibakar oleh massa Muslim. Seorang pria Arakan, 56 tahun, yang lari dari seperempat daerah Narzi pada 12 Juni berujar: “Kami takkan bisa kembali. Semuanya hancur. Kami kehilangan semuanya. Kami kehilangan semua properti, bahkan pakaian kami. kami tak tahu nasib kami kemudian. Kami sangat miskin.”⁷⁵ Perempuan Arakan, 49 tahun, yang kampungnya di luar Sittwe diserang sekelompok bersenjata Rohingya pada 10 Juni, menuturkan: “Saya kehilangan rumah dan semua barang-barang. Jika saya berdiam diri di rumah, saya mungkin sudah dibunuh. Mereka memakai batang kayu dan senjata lain.... Saya kehilangan rumah dan takkan bisa membangunnya kembali sendirian.”⁷⁶

⁷² Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Myanmar: Pengungsi di Negara Bagian Rakhine, Laporan Situasi No. 4, 5 Juli 2012, hal. 2.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ 43,5 persen penduduk negara bagian Arakan hidup di bawah garis kemiskinan, kedua setelah Negara Bagian Chin, menurut studi 2011 oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Lihat UNDP, “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009-2010): Poverty Dynamics Report, Juni 2011; Lihat juga, UN General Assembly, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar,” A/66/365 (16 September 2011), hal. 17.

⁷⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan C.C., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁷⁶ Waawancara Human Rights Watch dengan A.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Perempuan Rohingya, 38 tahun, yang menderita serangan brutal oleh massa Arakan yang memasuki rumahnya pada 11 Juni, berkata pada Human Rights Watch, “Sementara beberapa dari mereka memukul kami, menampar, menonjok, menendang kami, yang lain mencuri semuanya. Mereka menjarah semua barang kami, dan mereka memukul kami.”⁷⁷ Dia kemudian mengungsi bersama keluarganya di Aung Mingala, sebuah kawasan di seperempat Sittwe yang jadi pertahanan terakhir umat Muslim, dan kemudian dia menuju pinggiran kota. Dia belum bisa kembali dan tak tahu apakah rumahnya masih berdiri.⁷⁸

Pria Rohingya, 28 tahun, yang lari ke seperempat daerah Narzi setelah melihat pembunuhan, pemukulan, dan pembakaran, bercerita pada Human Rights Watch bahwa keluarganya kehilangan semua harta milik, dan rumah mereka dibakar habis. Dia berujar, “Tolong beritahu pihak berwenang untuk kembalikan properti kami, mengizinkan kami kembali ke properti kami dan rumah kami. Itu saja yang kami minta.”⁷⁹

Di kawasan utara Arakan, Human Rights Watch juga menerima laporan-laporan bahwa aparat keamanan mencuri dan merampas harta dari rumah-rumah selama razia brutal yang mengakibatkan penangkapan massal. Bocah Rohingya, 17 tahun, berkata:

Mereka datangi pintu ke pintu, dari rumah ke rumah dan menangkap orang yang lebih tua dari anggota keluarga dan memukul anak-anak muda....
Mereka pergi dari ke rumah untuk cari apa saja yang bernilai mahal, termasuk cincin hidung emas dan mereka merampas beras serta makanan lain dan menaruhnya ke dalam truk. Mereka akan merampas toko-toko kecil, mengambil uang, barang-barang, semuanya.”⁸⁰

Pada akhir Juni, Human Rights Watch menyaksikan beberapa pengusaha Rohingya di Sittwe dikawal oleh tentara untuk menutup barang-barang dari kios-kios pasar yang rusak, meski kami tak dapat memastikan apakah ini bagian dari tugas normal atau dibayar. Tak ada bantuan pemerintah Burma secara sistematis untuk para pengungsi Rohingya kembali ke Sittwe dengan aman dan menjaga rumah dan harta mereka.

⁷⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁸⁰ Wawancara Human Rights Watch D.H., Bangladesh, 28 Juni 2012.

Relokasi Paksa

Warga Muslim tampak absen dari Sittwe, ibukota negara bagian yang sebelumnya riuh dengan multietnis, selama kunjungan Human Rights Watch. Ini sebagian karena keamanan di mana warga Muslim merasa takut di Sittwe dan mengurung diri di rumah, dan sebagian lagi karena banyak tempat tinggal dibakar dari lingkungan besar di Sittwe, menyebabkan mereka pergi menyelamatkan diri. Pemerintah juga memaksa merelokasi beberapa penduduk Muslim ke daerah pinggiran kota.

Sementara relokasi paksa agaknya untuk kepentingan mencegah serangan warga Arakan terhadap penduduk Muslim, dan sebaliknya—langkah relokasi penduduk ini memunculkan perilaku diskriminatif, yang hanya menargetkan penduduk Rohingya.

Berlaku bagi situasi di Negara Bagian Arakan adalah rujukan Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Pengungsian,⁸¹ yang diambil dari prinsip-prinsip yang diterima hukum internasional.⁸² Prinsip-Prinsip ini mengatur batasan relokasi penduduk. Semua otoritas berkewajiban sesuai hukum internasional “untuk mencegah dan menghindari kondisi yang memungkinkan pemindahan penduduk.”⁸³ Sebelum keputusan apapun yang mengharuskan pengungsian penduduk, pihak berwenang perlu meninjau semua alternatif yang layak, dan ketika tak ada alternatif sama sekali, pihak berwenang mengambil “semua langkah” meminimalisir pengungsian dan efek merugikan yang menyertainya.⁸⁴ Tak seorang pun boleh diungsikan secara sewenang-wenang dari rumah mereka, sebagaimana dengan pasti terjadi pada kasus yang bertujuan atau hasilnya mengubah komposisi etnis atau agama dari penduduk bersangkutan.⁸⁵ Ini keprihatian serius yang diberikan Presiden Thein Sein dalam pernyataan 12 Juli bahwa “satu-satunya solusi” adalah mengirimkan Rohingya ke negara ketiga atau ke pengungsi yang diawasi UNHCR.⁸⁶ Panduan Prinsip-Prinsip juga menetapkan pemindahan tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hak-hak atas kehidupan, kebebasan bermartabat, dan

⁸¹ Panduan Prinsip-Prinsip tentang Pengungsi Internal (“Panduan Prinsip-Prinsip”), U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998), noted in Comm. Hum. Rts. res. 1998/50.

⁸² Catatan pengantar dalam Prinsip-Prinsip Umum menyatakan: “Prinsip-prinsip mencerminkan dan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional.” Ibid. paragraf. 9.

⁸³ Ibid.,prinsip 5.

⁸⁴ Ibid.,prinsip 7.

⁸⁵ Ibid.,prinsip 6.

⁸⁶ Myanmar moots camps, deportation as Rohingya 'solution,'” Agence France Presse, 12 Juli 2012, <http://www.rnw.nl/english/bulletin/myanmar-moots-camps-deportation-rohingya-solution-o> (diakses 13 Juli 2012).

keamanan bagi mereka yang diungsikan.⁸⁷ Dan setiap pemindahan harus “tak lebih dari yang diperlukan sesuai keadaan.”⁸⁸

Pria Rohingya, 42 tahun, berkata pada Human Rights Watch bahwa pada 23 Juni, pihak berwenang memaksa merelokasi ratusan pengungsi Rohingya dari Aung Mingala di Sittwe, ke lapangan dekat Thackabyay, beberapa kilometer di luar Sittwe, sebuah daerah pinggiran ibukota. Dia berujar, “Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pertama datang enam truk besar militer, dan kemudian dua, dan lantas truk lain, Mereka mengangkut orang-orang tua, anak-anak, remaja bersama-sama. Setiap truk penuh. Dan mereka begitu saja membiarkan semuanya ke Thackabyay.”⁸⁹ Dalam kasus ini, pihak berwenang mengelompokkan penduduk yang direlokasi sebagai “tamu asing,” meningkatkan ketakutan komunitas Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya di bawah undang-undang Burma bahkan jika mereka telah bermukim di Sittwe turun-temurun.

Perempuan Rohingya, 38 tahun, menceritakan pada Human Rights Watch bahwa dia melihat kelompok besar pengungsi Rohingya diturunkan oleh militer di daerah relatif sepi tanpa ketentuan memadai. Katanya:

Sekarang musim hujan angin membuat hidup sangat sulit. Ada sekitar 600 sampai 700 orang datang ke sini [Thackabyay], kami tak tahu persisnya, dalam lebih dari 10 truk militer. Militer memberitahu mereka punya penampungan untuk kami. Truk datang sekitar jam 10 pagi. Mereka bilang, “Kamu sekarang sendirian, mintalah bantuan dari Tuhan kamu.” Itulah yang mereka katakan saat mereka menurunkan kami.⁹⁰

Tantangan Mengembalikan Pengungsi

Ada perasaan saling memusuhi antara penduduk pengungsi Arakan dan Rohingya yang akan menyulitkan proses pemulangan ke rumah dan membangun kembali kehidupan.

⁸⁷ Prinsip-Prinsip Panduan, prinsip 8.

⁸⁸ Ibid., prinsip 6(3).

⁸⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Di Sittwe dan sekitarnya, di mana mayoritas penduduk pengungsi ditempatkan, tampaknya ada keinginan kekal antara Rohingya untuk mengambil kembali properti dan membangun lagi rumah, tapi pertanyaan yang mereka ajukan apakah pemerintah akan memutuskan untuk menghormati hak mereka kembali pulang. Beberapa warga Rohingya di Sittwe mengungkapkan perasaan putus-asah dan telengas.⁹¹

Warga pengungsi Arakan di Sittwe, sebaliknya, punya bayangan jelas kembali. Beberapa dari 22 warga Arakan yang diwawancara Human Rights Watch menuntut penuh pemisahan komunitas di masa depan, sebuah skenario yang menginginkan penduduk Muslim pindah dari Sittwe. Warga Arakan juga bicara pada Human Rights Watch bahwa mereka ingin melihat kehadiran militer lebih besar di negara bagian⁹² dan menunjukkan hak milik dan kebebasan bergerak komunitas Rohingya harus dibatasi.

Keinginan untuk pemisahan dan menolak kewarganegaraan Rohingya, bagi sebagian orang, berakar pada pertimbangan politik dan ekonomi, termasuk melindungi peluang ekonomi yang sudah terbatas bagi orang-orang etnis Arakan. Bagi yang lain, keinginan pemisahan berakar pada membentengi ketakutan dari kekerasan mutakhir.

Penentangan Arakan terhadap kembalinya penduduk Muslim ke lingkungan mereka sebelumnya di Sittwe tampaknya menyebar luas. Seorang perempuan pengungsi Arakan, 49 tahun, berkata pada Human Rights Watch:

Jika tak ada [Rohingya], kami akan kembali. Saya ingin pemerintah memindahkan [Rohingya] keluar dari komunitas kami. Jika tak memindahkan mereka, kami takut diserang lagi suatu hari nanti. Saya lebih suka menuntut tak ada [Rohingya] di komunitas kami. [Rohingya] harus pindah ke negara Muslim.... Banyak dari kami tak punya rumah dan kami bilang lebih baik tinggal di kamp penampungan karena kami tak ingin tinggal di kampung dengan [Rohingya]. ”⁹³

⁹¹ Lihat, contohnya, wawancara Human Rights Watch dengan Z.F., C.E., C.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁹² Lihat, contohnya, wawancara Human Rights Watch dengan C.D., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁹³ Wawancara Human Rights Watch dengan A.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Sentimen ini bergaung di antara komunitas dan tingkat politisi. Di Sittwe, pemimpin Arakan terkemuka dari partai politik lokal berkata pada Human Rights Watch:

Saya pikir mereka [Rohingya] tak punya hak untuk kembali ke tanah mereka. Isu ini tak cuma urusan pemerintah negara bagian lokal. Isu ini untuk pemerintah persatuan di Naypyidaw. Juga, komunitas internasional yang mempertimbangkan solusi yang *fair*. Di daerah kota [Sittwe], untuk hidup berdampingan secara damai tidak pragmatis. Ini takkan mudah, karena orang merasa sangat trauma dalam hati mereka dan begitu ketakutan dan membenci, dan untuk membangun kepercayaan bersama akan butuh waktu. Saya pikir pemerintah daerah akan merencanakan permukiman mereka di tempat lain.⁹⁴

Pemerintah Burma tetap sepenuhnya bertanggung-jawab melindungi hak-hak anggota komunitas yang terpapar konflik di Negara Bagian Arakan. Setiap pemulangan kembali atau program pemindahan bagi orang-orang terusir akan membutuhkan rekonsiliasi yang didukung penuh dan strategi reintegrasi dilakukan di bawah wewenang pemerintah nasional. Sejumlah warga Arakan dan Rohingya berkata pada Human Rights Watch bahwa hasil dari situasi ini akan bergantung pada keputusan yang dibuat pemerintah.⁹⁵ Pemerintah harus dapat mengatasi dugaan soal hak-hak yang takkan menjadi prioritas. Di Sittwe, warga Arakan mengatakan pada Human Rights Watch, mereka berharap pemerintah mengusir semua warga Muslim dari ibukota, dan warga Rohingya, yang diwawancara Human Rights Watch, berujar bahwa mereka tak berharap pada keputusan pemerintah yang dibuat menguntungkan mereka.⁹⁶ Pria Rohingya berumur 65 tahun bertutur:

Apa yang terjadi di masa depan tergantung pada kebijakan pemerintah. Di sini pemerintah negara, kementerian negara, dan mereka yang paling berkuasa di negara adalah orang-orang Arakan, dan kami semua bergantung pada keputusan mereka. Pemerintah nasional mampu undang-undang keadaan darurat. Kini kami berada dalam posisi putus-asa.⁹⁷

⁹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan B.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁹⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.A. dan A.E., Yangon, Burma, Juni 2012, dan A.H., A.I., B.Z., B.A., B.B., B.D., B.I., C.A., C.D., C.E., C.F., C.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan C.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Ketakutan mengenai peran pemerintah Burma tercermin dalam pernyataan para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Mereka bilang pada Human Rights Watch bahwa mereka tak aman lagi tinggal di Burma dan kembali ke Burma akan mengakibatkan mereka mati atau hidup tanpa martabat. Seorang pengungsi menjelaskan, “Di Burma kami menjalani hidup tanpa martabat dan dilecehkan. Lebih baik bagi kami berlindung di sebuah negara yang selamat dan aman bahkan jika kami tidak diperlakukan dengan baik di sini.”⁹⁸

⁹⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan D.G., Maungdaw, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

IV. Bantuan Kemanusiaan

Pada 19 Juli, pemerintah Burma memperkirakan 70,000 orang mengungsi akibat kekerasan sektarian di Negara Bagian Arakan sejak 8 Juni.⁹⁹ Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Pengungsi melaporkan bahwa penilaian lintas-lembaga perlu segera dikerjakan untuk mengatasi 104,719 pengungsi internal (dikenal *internally displaced persons* atau IDPs) yang menetap di 114 lokasi di empat kota.¹⁰⁰

Kebanyakan penduduk pengungsi ini bermukim di ibukota negara bagian, Sittwe, dan kotamadya Sittwe—total 102 titik¹⁰¹ pengungsi—akibat pembakaran dan pengrusakan meluas terhadap perkampungan dan rumah-rumah yang mengusir warga Arakan dan Rohingya berpindah ke biara, masjid, sekolah, rombongan besar keluarga, dan tenda-tenda darurat di pinggiran kota, yang terakhir dihuni pengungsi Muslim. Human Rights Watch tak bisa mengunjungi kamp-kamp pemukiman pengungsi Rohingya di Sittwe karena akses dilarang oleh pihak berwenang dan risiko penganiayaan fisik dari warga lokal Arakan, tapi kami mengunjungi tiga kamp pengungsi Arakan di Sittwe, termasuk sekolah, biara, dan kelompok besar keluarga. Warga pengungsi Arakan tidur di lantai kotor dan anak-anak tak mendapatkan pendidikan di kamp penampungan; makanan dan bantuan kesehatan sangat minimal. Sedikitnya satu kamp pengungsi Arakan, penduduk dan staf relawan merasa tiadanya keamanan dan mengungkapkan ketakutan mengenai kemungkinan bentrokan di masa depan dengan penduduk Muslim terdekat.¹⁰²

Di bawah Panduan Prinsip-Prinsip PBB, “Otoritas [nasional] memiliki tugas dan tanggung-jawab utama untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi internal dalam kewenangan mereka.”¹⁰³ Pemerintah harus melaksanakan Panduan Prinsip-Prinsip “tanpa diskriminasi apapun,” termasuk agama, asal kewarganegaraan dan etnis, atau status hukum.¹⁰⁴

⁹⁹ Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan: Pengungsi di Negara Bagian Rakhine, Laporan Situasi No. 5, 19 Juli 2012, hala. 1.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Wawancara Human Rights Watch dengan A.I., B.Z., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹⁰³ Panduan Prinsip-Prinsip PBB, prinsip 3(1).

¹⁰⁴ Ibid., prinsip 4(1).

Panduan Prinsip-Prinsip mengatur pertanggung-jawaban pemerintah terhadap para pengungsi. Keselamatan dan keamanan pengungsi harus dilindungi, termasuk dari serangan ke kamp atau penampungan mereka.¹⁰⁵ Pengungsi punya hak untuk bebas bergerak dan “tidak boleh dibatasi atau dikurung di dalam kamp.”¹⁰⁶ Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin akses, tanpa diskriminasi, pada makanan, tempat perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, di antara kebutuhan lain.¹⁰⁷

Terkait kepatuhan ketentuan bantuan, Panduan Prinsip-Prinsip menetapkan bahwa “semua bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan imparisialitas dan tanpa diskriminasi.”¹⁰⁸ Sementara tanggung-jawab utama untuk memberikan bantuan terletak pada otoritas nasional, mereka “harus mengijinkan dan memfasilitasi arus bebas bantuan kemanusiaan” dan memungkinkan “akses segera dan tanpa hambatan ke pengungsi.”¹⁰⁹

Akses untuk Makanan dan Larangan Kebebasan Bergerak

Pengungsi Rohingya menghadapi situasi kemanusiaan yang jauh lebih sulit ketimbang penduduk lain yang terpapar konflik karena larangan pemerintah terhadap kebebasan bergerak mereka dan penyerangan bagi mereka yang meninggalkan kamp penampungan dan perkampungan. Contohnya, warga Rohingya yang tak mengungsi dilarang untuk meninggalkan rumahnya di lingkungan Aung Mingala di Sittwe yang dijaga ketat karena ancaman kekerasan dari warga Arakan. Di daerah Sittwe lain serta kawasan utara Negara Bagian Arakan, pasukan keamanan memberlakukan larangan bergerak, mencegah Rohingya berkeliaran di seputar kota. Puluhan ribu lebih Rohingya pindah ke kamp pengungsian di luar pusat kota, beberapa di hutan, atau bersembunyi di sekitar Maungdaw dan Sittwe. Beberapa ikut dengan keluarga besar.

Pria Rohingya, 65 tahun, yang menetap bersembunyi dengan keluarganya di sebuah rumah di pusat kota Sittwe, berujar:

¹⁰⁵ Ibid., prinsip 10 and 11.

¹⁰⁶ Ibid., prinsip 12 dan 14.

¹⁰⁷ Ibid., prinsip 18, 19, dan 23.

¹⁰⁸ Ibid., prinsip 24(1).

¹⁰⁹ Ibid., prinsip 25.

Kesulitannya kami tak mendapatkan pelayanan dan kami takkan bisa bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain. Saya tak bisa diam lebih lama lagi. Kami di rumah terus dua minggu ini. Pada hari Rabu, jam 6 pagi saya diam-diam ke pasar. Saya cuma sendiri dan membeli beberapa kari dan mangga untuk keluarga saya. Saya melihat banyak orang Arakan di pasar sangat bahagia tapi warga Muslim tak boleh pergi. Ini penderitaan bagi kami. Kami tak bisa pergi keluar dengan bebas. Berapa lama lagi kami terus-terusan di rumah? Berapa lama kami bisa hidup dengan kondisi begini? Saya tidak tahu apa rencana pemerintah untuk kami... Kami tak mendapatkan beras. Tiadanya beras adalah masalah utama.¹¹⁰

Di kawasan utara Negara Bagian Arakan, ada banyak pengungsi Rohingya akibat kebrutalan aparat keamanan pada awal Juni. Desa-desa yang terpapar konflik juga merembet pada daerah terpencil di sekitar Maungdaw di mana akses lembaga kemanusiaan sangat dibatasi oleh larangan pemerintah yang sekian lama terhadap daerah berpenduduk Rohingya, dan darurat militer yang ditetapkan negara setelah bentrokan bulan Juni. Persediaan makanan di daerah ini dirampas dalam serangan terbaru, dan Rohingya tak boleh pergi ke pasar, menekan mereka dalam kondisi yang sangat rentan. Komunitas-komunitas tertentu tak terpengaruh imbas kekerasan dan tak mendapatkan manfaat dari bantuan kemanusiaan meski mereka tak punya akses terhadap pangan dan sumber daya sejak kampung mereka diserang dalam operasi penggeledahan polisi.

Bantuan pangan bagi Rohingya seluruhnya bergantung pada badan-badan internasional PBB, karena warga Rohingya dilarang ke pasar setempat atau tergantung pada donasi dari penduduk Burma lebih luas. LSM-LSM Arakan sigap memberi kebutuhan bagi komunitas Arakan yang terjerembab konflik. Pada 29 Juni, para bikhu di Sittwe mendistribusikan pamflet, berisi hasutan, kepada warga lokal Arakan, yang menganjurkan pembagian antara komunitas dan menuntut warga Arakan melawan atau memusuhi warga Muslim dengan cara apapun. Ini memperburuk kehidupan Rohingya untuk akses pangan dan layanan dasar. Bikhu yang menyebarkan upaya diskirminatif tersebut berkata pada Human Rights Watch:

¹¹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan C.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Ini ditujukan pada orang-orang Arakan. Pagi ini kami menyebarkan pamflet ke pinggiran pusat kota. Ini pemberitahuan yang mendesak orang Arakan agar tak menjual apapun pada warga Muslim atau membeli apapun dari warga Muslim. Poin kedua, orang Arakan tak memiliki persahabatan atau bersahabat dengan warga Muslim. Alasannya orang Muslim mencuri tanah kami dan minum air kami dan membunuh warga kami. Mereka makan beras kami dan tinggal dekat rumah kami. Jadi kita akan akan terpisah. Kita perlu melindungi orang Arakan.... Kami menyebarkan pamflet ini ke pasar. Kami tak ingin ada hubungan apapun dengan orang Muslim. Para ulama Islam sangat berbahaya. Mereka berhubungan dengan al Qaeda.¹¹¹

Para bikhu Arakan menyerukan untuk mengusir komunitas Muslim yang diterima dengan terbuka komunitas Arakan lebih luas. Seorang pengungsi Rohingya, 42 tahun, berujar, “Kebanyakan orang Arakan kini menolak menjual makanan pada warga Muslim.”¹¹² Bahkan militer Burma menyetujuinya. Seorang Rohingya berkata pada Human Rights Watch, para tentara angkatan darat Burma yang sebelumnya pergi ke pasar terdekat, atas kemauan sendiri, untuk membeli beras dan kebutuhan lain, tak melakukannya lagi. Ini diperparah fakta bahwa warga Muslim sendiri dicegah militer meninggalkan kamp penampungan, dan fakta tersebut menempatkan mereka jadi sasaran kekerasan yang dilakukan warga lokal Arakan bila mereka mengambil risiko secara sembunyi-sembunyi meninggalkan kamp Muslim. Seorang perempuan Rohingya, 35 tahun, yang mengungsi di Aung Mingala, Sittwe, berujar:

Kami sangat kekurangan makanan. Jika kami berusaha pergi ke kampung lain, warga Arakan memukul kami.... Mereka [militer Burma] melarang kami meninggalkan area. Bagaimana kami bisa terus tinggal di sini? Kami menghadapi masalah kekurangan pangan. Kami masih belum dengar perubahan apapun. Sebelumnya, saat kami memberi uang pada tentara, mereka akan membeli makanan buat kami, tapi sekarang mereka tak mau. Ini seperti sebuah sangkar. Kami ingin pihak berwenang untuk membantu

¹¹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan C.D., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹¹² Wawancara Human Rights Watch dengan Z.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

kami semampu mereka, terutama dengan makanan. Kami ingin mereka menolong kami mendapatkan makanan dari pasar.¹¹³

Human Rights Watch menerima laporan beberapa warga Rohingya yang berani ambil risiko keluar dari area mereka untuk mencari makanan dan perbekalan lain telah dipukul dan dibunuh.¹¹⁴ Human Rights Watch tak dapat memverifikasi secara independen klaim tersebut.

Pria pengungsi Rohingya, 28 tahun, bermukim di salah satu kamp penampungan utama di luar Sittwe, kini jadi tempat bagi sedikitnya 10,000 orang Rohingya, menuturkan pada Human Rights Watch:

Pihak berwenang kini benar-benar mengurus kami yang dekat jalan raya. Tapi mereka yang jauh dari jalan raya tak mendapatkan apa-apa. Para perwira tinggi militer datang dan memberitahu kami bahwa mereka akan mengurus kami. Mereka akan membangun rumah dan mengurus kami, kata mereka. WFP datang dan memberi beberapa makanan tapi itu tak cukup. Mereka datang untuk menghitung kepala keluraga tapi di hutan ada banyak ribuan orang bersembunyi, dan mereka takut dan tak ingin keluar. Mereka benar-benar takut dan kelaparan.¹¹⁵

Perempuan pengungsi Rohingya, 38 tahun, di bagian Aung Mingala—satu-satunya lingkungan Muslim yang tersisa di pusat kota Sittwe—berkata pada Human Rights Watch:

Area ini sangat kecil tapi begitu padat penghuni. Sangatlah sulit untuk makan. Kami tak punya makanan. Area sekitarnya dikelilingi orang Arakan. Jika kami keluar, kami takut kami akan dibunuh oleh Arakan, jadi tak ada yang berani pergi. Tak ada yang mengantarkan makanan. Pemerintah tak memberi apapun sejauh ini.¹¹⁶

¹¹³ Wawancara Human Rights Watch dengan C.E., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹¹⁴ Lihat, contohnya, wawancara Human Rights Watch dengan Z.H., A.Z., C.E., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹¹⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.F., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹¹⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan C.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

Pemerintah Burma berkewajiban, sesuai hukum internasional, untuk menjamin semua orang-orang yang terusir ini memiliki akses memadai pada makanan dan bantuan kemanusiaan lain. Pemerintah telah gagal mematuhi kewajibannya karena tak bisa mengatasi keprihatinan keamanan penduduk Rohingya, dengan memberlakukan larangan diskriminatif atas kebebasan bergerak, dan larangan sewenang-wenang terhadap badan-badan kemanusian yang hendak memberikan bantuan kepada penduduk beresiko.

Risiko Bantuan Kemanusiaan: Kebencian dan Ancaman Warga Lokal

Pada 10 Juni, semua pekerja bantuan kemanusiaan internasional dan non-esensial dari badan-badan internasional dievakuasi dari kawasan utara Negara Bagian Arakan dan Sittwe ke Rangoon karena risiko keamanan. Sejak itu, badan-badan kemanusiaan berusaha kembali dan pihak berwenang menetapkan akses terbatas pada sebagian kecil dari mereka, dan menolak lebih banyak badan kemanusiaan untuk memasuki area operasi mereka. Sementara beberapa upaya bantuan darurat diizinkan, aksesnya tetap dibatasi ke area tertentu dan sama sekali melarang akses pada banyak area berpenghuni warga Rohingya.

Ada kebencian meluas di antara komunitas Arakan terhadap badan-badan kemanusiaan dan PBB di Negara Bagian Arakan. Seorang Arakan yang diwawancara Human Rights Watch berkata mereka marah karena lembaga-lembaga ini mengutamakan bekerja dengan penduduk Rohingya di kawasan utara Negara Bagian Arakan selama bertahun-tahun, dan kurang memfokuskan pada penduduk Arakan yang sebagian besar melarat, meski ada beberapa yang kaya.¹¹⁷ Banyak orang Arakan berkata mereka merasa lembaga ini mengabaikan kebutuh Arakan selama bertahun-tahun dan berkontribusi pada pemisahan antara komunitas Arakan dan Rohingya, yang kian memusuhi lembaga dan pekerja bantuan.¹¹⁸ Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) hanya diberi mandat untuk bekerja dengan Rohingya dan keadaan Rohingya yang tanpa kewarganegaraan. Namun demikian, tetap saja hal ini menyulut kebencian dan persepsi

¹¹⁷ Ada lebih dari 10 LSM internasional dan badan PBB yang beroperasi di kawasan utara Negara Bagian Arakan, wilayah yang dirujuk warga Arakan dengan sebutan merendahkan sebagai “negeri Kalar,” daerah yang dihuni kebanyakan penduduk Muslim Rohingya.

¹¹⁸ Ada lebih dari 10 LSM internasional dan badan PBB yang beroperasi di kawasan utara Negara Bagian Arakan, wilayah yang dirujuk warga Arakan dengan sebutan merendahkan sebagai “negeri Kalar,” daerah yang dihuni kebanyakan penduduk Muslim Rohingya.

yang bias di antara warga Arakan. Sejak kekerasan meletup, ada banyak desas-desus dan salah paham yang disebarluaskan tentang peran dan aktivitas lembaga-lembaga kemanusiaan.

Kebencian ini, benar atau tidak, berimbang pada upaya-upaya bantuan. Ia meningkatkan ancaman keamanan yang jauh lebih serius terhadap badan-badan kemanusiaan dan para pekerjanya, yang seterusnya menghambat akses mereka.

Pandangan sengit warga lokal pada badan-badan kemanusiaan internasional—dilandasi bias etnis terhadap warga Rohingya—tampaknya menjadi faktor penangkapan dan penahanan beberapa pekerja PBB dan LSM internasional. Otoritas lokal menangkap 10 staf Rohingya dari PBB dan LSM internasional pada bulan Juni terkait kekerasan sektarian, termasuk 6 pekerja dari Medecins Sans Frontieres (*Doctors Without Borders*).¹¹⁹ Beberapa pekerja lembaga bantuan yang ditangkap dikabarkan didakwa “makar” karena menyampaikan informasi ke dunia internasional tentang kejadian di Negara Bagian Arakan—tuntutan umum dalam beberapa kasus masa lalu terhadap tahanan politik—and kasus mereka ditunda.¹²⁰

Beberapa Arakan dari beragam latar belakang sosial berkata pada Human Rights Watch bahwa staf badan kemanusiaan beretnis Rohingya berhubungan dengan al Qaeda dan kelompok ekstremis internasional lain. Kebencian terhadap lembaga-lembaga internasional juga disampaikan melalui pamflet yang menyatakan penduduk harus menyerang staf dan pendukung lembaga-lembaga tertentu. Sebuah pamflet, yang disebarluaskan secara lokal, diperoleh Human Rights Watch, menulis setiap orang yang bekerja untuk Rohingya akan diakui “sebagai penghianat dan dengan demikian musuh kita.... Kita tak akan lagi duduk dan melihat kalian menempati negeri kami dan bekerja untuk pembangunan [Rohingya].” Pamflet juga berisi para tuan tanah yang menyewakan ruang bagi LSM-LSM internasional di Sittwe akan jadi target. Merujuk badan-badan PBB, tulisnya, “Kita harus menyerang mereka.”¹²¹

¹¹⁹ “10 Aid Workers Held in Myanmar: UN,” *Agence France Presse*, 16 Juli 2012, <http://www.rnw.nl/english/bulletin/10-aid-workers-held-myanmar-un> (diakses 16 Juli 2012).

¹²⁰ Maung Aye, “Arrested NGO Employees Produced in Court in Maungdaw,” *Narinjara News*, 11 Juli 2012, <http://www.narinjara.com/main/index.php/arrested-ngo-employees-produced-in-court-in-maungdaw/> (diakses 16 Juli 2012).

¹²¹ Pamflet tak bertanggal itu berjudul, “Hati-hati! LSM yang datang ke sini untuk membantu Kalar Benggala,” dan ditandatangani oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Warga Etnis Wuntharnu, terjemahan tak resmi, Juni 2012 .

Seorang aktivis Arakan lokal dan dua pemimpin politik Arakan—dari Partai Pembangunan Nasional Rakhine dan Liga Arakan untuk Demokrasi—mengakui dan menyebarkan kebencian lokal sekian lama terhadap badan-badan bantuan, dan mengutakan alasan di baliknya, tapi menentang ancaman keselamatan fisik. Mereka berkata bahwa LSM internasional dan PBB akan disambut baik oleh komunitas Arakan sekarang dan masa depan.¹²² Hingga laporan ini ditulis, pemerintah Burma tak menyelidiki soal ancaman terhadap lembaga dan pekerja bantuan.

Desas-desus dan kampanye keliru menciptakan suasana permusuhan terhadap badan-badan PBB dan LSM internasional, mengancam arus bantuan kemanusiaan di antara kedua komunitas.

¹²² Wawancara Human Rights Watch dengan B.B., B.I., D.A., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

V. Penolakan Hak Kewarganegaraan untuk Rohingya

Pemerintah Burma telah lama menolak Rohingya mendapatkan hak kewarganegaraan di Burma. Ini memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka, dan menghadirkan hambatan serius untuk mencapai solusi langgeng dari kekerasan sektarian di Negara Bagian Arakan dan memecahkan situasi pengungsian Rohingya. Otoritas Burma menganggap kebanyakan warga Rohingya yang diizinkan tinggal di Burma sebagai “warga negara asing,” dan menolak kewarganegaraan mereka. Praktiknya, istilah Rohingya itu sendiri secara umum tak diterima atau digunakan pemerintah, yang umumnya merujuk penduduk ini sebagai “Benggala,” “yang menyebut diri Rohingya,” atau istilah merendahkan, “Kalar.”¹²³

Sebagian besar perlindungan hukum hak asasi manusia mencakup non-warga negara serta warga negara, kecuali pembatasan hak-hak politik, seperti hak untuk memilih. Namun, beragam pelanggaran hak asasi manusia terkait penolakan kewarganegaraan Burma untuk Rohingya ini termasuk pembatasan kebebasan bergerak, diskriminasi pembatasan akses pendidikan, penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, serta pajak dan penyitaan properti yang diskriminatif. Sementara banyak pelanggaran juga yang dilakukan pemerintah Burma kepada penduduk etnis Arakan, warga Rohingya di Negara Bagian Arakan seringkali jadi target utama dari pelanggaran ini.

Ketidakberdayaan warga Rohingya memperoleh kewarganegaraan muncul beberapa dekade silam. Pertengahan 1970-an, Burma mewajibkan semua warga negara untuk mengajukan permohonan Sertifikat Pendaftaran Nasional sesuai Undang-Undang Imigrasi Darurat, tapi Rohingya satu-satunya yang diberi Kartu Pendaftaran Warga Asing, di mana banyak sekolah dan pengusaha tak diterima.¹²⁴

¹²³ Seorang yang berkomunikasi dengan pejabat senior pemerintah dalam masalah ini berkata pada Human Rights Watch bahwa penggunaan sehar-hari pihak berwenang tak memakai kata “Rohingya,” lebih memilih menyebut “Benggala”. Dia bilang: “Pemerintah merujuk mereka sebagai penyusup asing, dan jika Anda memberi bantuan pada mereka, Anda memberi makan musuh. Inilah yang dipikirkan warga di Nyapyidaw.” Wawancara Human Rights Watch #14, Yangon, Burma, Juni 2012. Penduduk etnis Arakan population biasanya memakai sebutan melecehkan dengan “Kalar,” “Benggala,” dan “mereka yang mengaku Rohingya” untuk merujuk penduduk Rohingya.

¹²⁴ Human Rights Watch, *Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?*, September 1996, hal. 29, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a84a2.html> (diakses 12 Juli 2012).

Pada 1983, dalam apa yang tampaknya merespon pemulangan massal pengungsi Rohingya dari Bangladesh pada 1978, pemerintah Burma menyelesaikan sensus penduduk nasional di mana Rohingya tidak dihitung, menempatkannya tanpa kewarganegaraan melalui pengecualian. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menetapkan pengecualian ini dengan mengabaikan Rohingya dari daftar kelompok etnis yang diakui kewarganegaraan. Undang-undang ini membagi tiga kategori warga negara: (1) warga negara tetap, (2) warga negara sejawat, dan (3) warga negara naturalisasi. Kartu Pemeriksaan Kewarganegaraan bersdasarkan Warna dikeluarkan sesuai status kewarganegaraan—berturut-turut merah muda (*pink*), biru, dan hijau. Dengan undang-undang ini, warga negara penuh atau tetap adalah orang yang termasuk salah satu dari delapan apa yang dianggap “ras nasional” (Arakan, Burma, Chin, Kachin, Karen, Karenni, Mon, Shan), atau mereka yang leluhurnya menetap sebelum 1823, tahun pendudukan Inggris dimulai di wilayah yang sekarang ini Negara Bagian Arakan. Jika individu ini tak dapat membuktikan leluhurnya tinggal di Burma sebelum 1823, mereka masih dapat mengajukan permohonan naturalisasi. Mereka yang memenuhi persyaratan kewarganegaraan di bawah undang-undang 1948, tapi tak laik syarat dengan undang-undang 1982, dinilai sebagai warga negara sejawat jika mereka mengajukan aplikasi sebelum undang-undang 1982 diberlakukan.

Sesudah penerapan undang-undang 1982, warga asing dapat menjadi warga negara naturalisasi jika mereka dapat memastikan “bukti-bukti meyakinkan” di mana mereka atau orangtua mereka memasuki dan menetap di Burma sebelum kemerdekaan pada 1948. Orang yang sedikitnya salah satu orangtuanya memiliki satu dari tiga tipe kewarganegaraan Burma juga dapat menjadi warga negara naturalisasi. Selain dua kualifikasi ini, pasal 44 dari undang-undang 1982 menetapkan orang yang mengajukan diri menjadi warga negara naturalisasi harus setidaknya berusia 18 tahun, mampu bicara salah satu dari bahasa nasional dengan baik (bahasa Rohingya, yang dialeknya terpengaruh Chittagonian, tak diakui sebagai bahasa nasional), berkarakter baik, dan sehat jasmani.¹²⁵ Menurut ketentuan undang-undang ini, hanya warga penuh dan

¹²⁵ Bab 42 sampai 44 dari Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tentang persyaratan bagi warga naturalisasi Burma, menyatakan: 42) Tiap orang yang masuk dan tinggal di Negara sebelum 4 Januari 1948, dan anak-anak mereka lahir di dalam Negara dapat, jika mereka belum mengajukan di bawah Undang-Undang Persatuan Kewarganegaraan 1948, mengajukan permohonan kewarganegaraan naturalisasi ke Badan Pusat, dilengkapi bukti-bukti meyakinkan. 43) Orang selanjutnya, lahir di luar Negara, sejak tanggal Undang-Undang ini ditetapkan, juga dapat mengajukan kewarganegaraan naturalisasi: (a) orang yang lahir dari pasangan yang salah satunya diakui warga negara dan satunya warga asing; (b) orang yang lahir dari orangtua, salah satunya memiliki sanak keluarga yang diakui warga negara dan satunya warga negara naturalisasi; (c) orang yang lahir dari orangtua, salah satunya memiliki keluarga warga negara dan satunya warga asing; (d) orang yang lahir dari

naturalisasi “diakui untuk menikmati hak warga negara di bawah undang-undang, dengan pengecualian dari waktu ke waktu bahwa hak ini diatur Negara.” Semua bentuk kewarganegaraan ini, “kecuali warga negara karena lahir,” dapat dicabut oleh negara.

Pasal-pasal dalam undang-undang 1982 mengekalkan krisis kewarganegaraan dengan menolak warga negara bagi anak-anak yang lahir dari non-warga negara. Menurut sumber terpercaya tapi rahasia, ada sekitar 7,000 hingga 8,000 anak-anak Rohingya tak terdaftar di kawasan utara Negara Bagian Arakan, menyebutnya sebagai “anak-anak dalam daftar hitam,” yang lahir dari individu di bawah 18 tahun, pasangan tak terdaftar, atau keluarga di Bangladesh.¹²⁶ Anak-anak ini bisa mengajukan kewarganegaraan Burma bila sedikitnya salah satu orangtua mereka harus memiliki satu dari tiga tipe kewarganegaraan Burma. Kebanyakan warga Rohingya tak punya dokumen resmi, tersendat dalam segala upaya mendapatkan dokumen, atau cara apapun memberikan “bukti-bukti meyakinkan” dari garis keturunan mereka di Burma.¹²⁷ Warga Rohingya yang tak bisa menyediakan “bukti-bukti meyakinkan” kepada pemerintah tentang garis keturunan atau sejarah tempat tinggal akan dikecualikan dari tiga kelas kewarganegaraan Burma, bersama anak-anak mereka.

Selain kewarganegaraan, perkara lain adalah etnisitas. Undang-undang Burma tak mengakui Rohingya sebagai ras nasional Burma. Sementara beberapa jejak silsilah Rohingya diguratkan berabad-abad silam, juga ada banyak keluarga yang migrasi dan menetap di Arakan selama periode kolonial Inggris—namun, di bawah undang-undang 1982, mereka dikucilkan secara langsung dari kewarganegaraan dan dianggap tak membantu apapun dalam membentuk apa yang disebut etnis kebangsaan Burma. Bahkan bagi Rohingya yang keluarganya menetap di kawasan ini sebelum 1823, sangat sulit bagi mereka membuktikannya untuk memuaskan otoritas Burma yang hampir mustahil memberinya kewarganegaraan, mengingat status ras etnisnya atau kebangsaan mereka.

Pada Juni 2012, beberapa orang Rohingya menuturkan pada Human Rights Watch bahwa pemerintah lokal atau Arakan menyita kartu identitas mereka. Seorang perempuan Rohingya, 38 tahun, yang selamat dari serangan massa Arakan, berujar, “Mereka [para

orangtua, keduanya warga negara naturalisasi; (e) orang yang lahir dari orangtua, salah satunya warga negara naturalisasi dan satunya warga asing. 44) Pengajuan permohonan kewarganegaraan naturalisasi harus mengikuti persyaratan: (a) menjadi orang yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 42 atau pasal 43; (b) sudah berusia delapanbelas tahun; (c) mampu bicara dengan baik bahasa nasional; (d) menjadi karakter yang baik; (e) sehat jasmani.

¹²⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan pegawai internasional, Rangoon, Burma, Juni 2012.

¹²⁷ Ibid

penyerang] membawa banyak mobil dan mereka memuat barang-barang kami ke mobil itu. Mereka bahkan mengambil kartu penduduk kami. Mereka memaksanya.”¹²⁸ Puluhan ribu Rohingya kehilangan harta milik karena pembakaran pada Juni 2012, yang sangat mungkin menghancurkan dokumen penting dan kartu identitas; ini akan menciptakan masalah tambahan bagi mereka bila dihadapkan kerangka hukum Burma saat ini.

Pria Rohingya, 42 tahun, berkata pada Human Rights Watch, dia takut pemaksaan relokasi Rohingya keluar Sittwe sebagai upaya menjadikan pengungsi sebagai “tamu.” Di Burma. Dia menuturkan:

Pegawai tinggi imigrasi datang hari ini dan mengatakan dia ingin daftar orang-orang di penampungan. Dia ingin daftar, jadi kami buat daftar. Kami memberi formulir yang kami isi, dan mengacu pengungsi, formulir itu merujuk “tamu” Kami berkata, “Kami bukanlah tamu di sini.” Pegawai imigrasi membalas, “Saya tak bisa melakukan apapun, ini dari pihak berwenang lebih tinggi. Saya hanya mengikuti perintah.”¹²⁹

Human Rights Watch berulang-kali menyerukan pemerintah Burma mengamandemen atau mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 untuk mengakui atau mengabolikan kewarganegaraan bagi Rohingya di Burma dengan dasar yang sama seperti lainnya, yang memiliki hubungan efektif dan nyata seperti kelahiran, tempat tinggal, atau keturunan mereka di Burma, dan perlakukan mereka sebagai warga negara sederajat sesuai hukum Burma dan internasional.

¹²⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.H., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

¹²⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Z.I., Sittwe, Negara Bagian Arakan, Juni 2012.

VI. Pemulangan Paksa dari Bangladesh

Sejak serangan kekerasan pada 8 Juni, ratusan dan mungkin ribuan pencari suaka berusaha keluar dari Burma, menyeberangi Sungai Naf atau mencari rute alternatif untuk mengungsi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh, mengantisipasi gelombang pengungsi, memerintahkan penjaga perbatasan dan satuan laut untuk mencegah pencari suaka Burma dari jalur perbatasan ke Bangladeh. Seorang menteri membenarkan kebijakan ini pada media lokal dengan bilang, “Kami tak bisa berteman dengan teroris atau pemerkosa.”¹³⁰

Menurut laporan-laporan media, pemerintah Bangladesh mengklaim telah memaksa pulang lewat jalur darat atau laut antara 500 dan 700 warga Rohingya dari 8 Juni hingga 15 Juni. Pada 18 Juni, peneliti Human Rights Watch menyaksikan penjaga pantai Bangladesh mendorong sembilan perahu ke perairan Burma dari dermaga di kota pelabuhan Shah Porir Deep. Para jurnalis Bangladesh yang diberi akses pada tahanan pengungsi hari itu melaporkan bahwa kelompok ini berisi lebih dari 140 Rohingya.¹³¹

Meski mereka menahan para pencari suaka yang menuntut perhatian medis dasar dan makanan, Penjaga Perbatasan Bangladesh (*Border Guard Bangladesh* atau BGB) mengirim kembali pengungsi di sebuah perahu kayu yang rusak dan tak laik melaut selama hujan lebat. Ada bukti kebijakan Bangladesh ini memiliki konsekuensi fatal. Seorang jurnalis berkata pada Human Rights Watch bahwa dia mewawancara seorang ibu dari enam anak yang keluarganya berulang kali dipaksa pulang oleh pihak berwenang Bangladesh selama pekan kedua bulan Juni, sebelum perahu itu akhirnya berlabuh lagi ke Bangladesh. Dia berujar:

Kami tak bisa menahan kekerasan lagi, jadi kami datang ke Bangladesh. BGB membuat perahu kami bolak-balik tiga kali. Kami mengapung di laut selama empat hari empat malam. Anak perempuan saya berumur lima tahun tewas di perahu. Dia kelaparan sampai mati di bawah cuaca panas di laut.¹³²

¹³⁰ Komentar oleh Syed Ashraful Islam, Menteri Urusan Pemerintahan Daerah dan Koperasi, dikutip dari “No refuge for Rohingyas: Ashraf,” *Daily Star*, 20 Juni 2012, http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=38533.

¹³¹ Julfikar Ali Manik, *Daily Star*, 15 Juni 2012, <http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=238339>; Sadiqur Rahman and Mubin Khan, “BGB Menahan 18 Rohingya,” *New Age*, 16 Juni 2012, <http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-06-16&nid=13930>

¹³² Julfikar Ali Manik dan Dwaipayan Barua, “Rohingyas coming in again,” *Daily Star*, 19 Juni 2012, <http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=238934>.

Human Rights Watch juga menerima laporan dua perahu yang dikabarkan tak terlihat atau terdengar lagi sejak mereka dipaksa pulang oleh BGB, dan kuatir tenggelam di lepas pantai Bangladesh.¹³³

Seorang petugas BGB memberitahu Human Rights Watch pada 30 Juni bahwa mereka tidak mencegat kapal besar karena keadaan laut berombak, tapi konsisten memulangkan perahu-perahu lebih kecil dengan dua hingga tiga pencari suaka di perahu tersebut sebagai alasan rutin.¹³⁴ Pemulangan kembali Rohingya berlanjut pada awal Juli. Contohnya, para petugas BGB mengkonfirmasi bahwa mereka memulangkan 30 Rohingya pada 2 dan 3 Juli, dan kemudian 25 orang pada 5 Juli.¹³⁵ Polisi dan BGB dikabarkan menahan lusinan orang Rohingya yang mencapai Bangladesh pada sekitar 8 Juli.¹³⁶ Human Rights Watch tak dapat memverifikasi jumlah semua orang Rohingya yang dipaksa pulang oleh pihak berwenang Bangladesh.

Meski Bangladesh bukan bagian dari negara penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, tapi berkewajiban di bawah hukum internasional soal prinsip *nonrefoulement* yang menerima pencari suaka di perbatasan ketika mereka mengungsi karena ancaman keselamatan dan kebebasan.¹³⁷

¹³³ Human Rights Watch merekam wawancara dengan korban dan anggota keluarga dia pada 28 Juni di Bangladesh.

¹³⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan penduduk Teknaf, Bangladesh, 29 Juni 2012

¹³⁵ Wawancara Human Rights Watch via telepon dengan BGB commander (nama disamarkan), Teknaf, 30 Juni 2012

¹³⁶ "Lagi 25 Rohingyas Diusir Pulang," *Daily Star*, July 5, 2012, <http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=241025>

¹³⁷ Abdullah Juberee dan Nurul Islam, "Fleeing Rohingya spreading deep inside Bangladesh," *New Age*, 8 Juli 2012, <http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-07-08&nid=16351>

VII. Rekomendasi

Kepada Pemerintah Burma:

- Mendukung mekanisme internasional independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional yang dilakukan pasukan keamanan di Negara Bagian Arakan dan tempat lain di seluruh negeri. Terutama, menyediakan akses bebas ke wilayah terpapar konflik di Negara Bagian Arakan bagi pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Burma dan perwakilan Kantor PBB Komisi Tinggi untuk HAM (OHCHR).
- Meminta OHCHR mendirikan sebuah kantor di Burma dengan perlindungan, promosi, dan mandat bantuan teknis secara penuh, serta membentuk kantor cabang di negara-negara bagian, termasuk Negara Bagian Arakan.
- Menjamin keamanan badan-badan PBB dan organisasi nonpemerintah kemanusiaan, bersinambung, dan akses bebas ke semua area yang penduduknya terkena konflik di Negara Bagian Arakan, dan membuat komitmen langgeng dengan mereka untuk mengatur dukungan bantuan, pemulihan, dan pembangunan akhir pada penduduk yang membutuhkan. Terutama, mencabut larangan terhadap badan-badan kemanusiaan bekerja di Negara Bagian Arakan dan menjamin mereka bisa bebas bergerak ke dusun-dusun terpencil untuk menilai kebutuhan para korban konflik dan mengirimkan bantuan yang diperlukan.
- Menyelidiki secara kredibel tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan secara pantas mendisiplinkan atau menuntut mereka yang bertanggung-jawab, tanpa pandang pangkat atau jabatan.
- Memberi informasi secara cepat tentang nasib ratusan orang yang ditahan sejak operasi keamanan di kawasan utara Negara Bagian Arakan dimulai.
- Mengizinkan akses penuh dan tanpa hambatan kepada semua pekerja organisasi kemanusiaan internasional terhadap fasilitas rumah tahanan resmi dan setengah resmi di Negara Bagian Arakan tempat mereka ditahan terkait dengan kekerasan sektarian baru saja terjadi.
- Menjamin setiap orang yang ditahan memiliki akses penuh untuk penasihat hukum dan menerimanya segera sebelum diadili.
- Memerintahkan dengan segera pasukan keamanan, termasuk Nasaka, untuk menghentikan penangkapan massal terhadap warga Rohingya, dan

membebaskan segera setiap orang yang ditahan kecuali ada bukti tuduhan kredibel terhadap mereka.

- Menjamin petugas penegak hukum untuk tidak mengerahkan kekuatan berlebihan atau sewenang-wenang, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api. Mencabut keadaan darurat sesegera mungkin, yang telah mendorong penangkapan massal tanpa perlindungan memadai.
- Mencabut semua larangan tak perlu tentang kebebasan bergerak terhadap warga Rohingya, sehingga mereka bisa bebas pergi ke pasar dan mendapatkan akses pangan dan perbekalan lain, serta memulangkan kembali ke rumah mereka dan mengembalikan properti, dan memberikan mereka perlindungan yang dibutuhkan.
- Perlakukan para pengungsi internal sesuai dengan Panduan Prinsip-Prinsip PBB tentang Pengungsi Internal.
- Menyediakan lokasi alternatif untuk mengakomodasi pengungsi internal dan pengungsi yang merasa tak bisa kembali ke kampungnya dan mereka yang berharap ditampung ke area lain atau yang tinggal sukarela di sekitar permukiman.
- Membuat pernyataan publik dengan jelas untuk mengatasi ketegangan yang berlangsung di Negara Bagian Arakan dan berkomitmen untuk melindungi semua individu secara setara di Negara Bagian Arakan. Menjamin pemulangan kembali mereka yang terusir dan pengungsi sesuai dengan standar internasional, dengan basis sukarela yang memperhatikan keselamatan dan martabat penduduk yang kembali pulang.
- Memprakarsasi program-program rekonsiliasi dengan penduduk lolak untuk mempromosikan dan memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi para pengungsi.
- Berperan dalam kampanye informasi publik berbasis luas yang menekankan toleransi dan nondiskriminasi. Terutama, menegaskan bahwa Rohingya adalah salah satu dari banyak kelompok etnis yang telah berperan membentuk Persatuan nasional.
- Mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin akses dan keselamatan badan-badan kemanusiaan dan staf mereka untuk melayani semua penduduk yang membutuhkan.
- Mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 untuk mengakui atau mengabulkan kewarganegaraan kepada mereka yang beretnis Rohingya dengan landasan yang sama seperti lainnya dengan hubungan efektif dan nyata bagi Burma, dengan alasan seperti kelahiran, tempat tinggal, dan keturunan, dan perlakukan mereka sebagai warga setara sesuai hukum internasional dan

konstitusi Burma. Menjamin, sesuai dengan pasal 7 dalam Konvensi Hak-Hak Anak, bahwa anak-anak Rohingya memiliki hak memperoleh kewarganegaraan, bukan sebaliknya mereka malah tak bernegara.

- Tandatangani dan ratifikasi Konvensi 1951 yang berhubungan dengan Status Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Mengurangi Penduduk Tanpa Kewarganegaraan.
- Mengembangkan rencana jangka panjang berkonsultasi dengan komunitas korban guna mempromosikan rekonsiliasi dan mengakhiri diskriminasi di Negara Bagian Arakan.

Kepada Pemerintah Bangladesh:

- Membuka dengan segera perbatasan untuk mengizinkan para pencari suaka ke Bangladesh dan memberikan mereka setidaknya perlindungan temporer.
- Memberikan akses bebas dan tanpa halangan kepada badan-badan kemanusian untuk melayani bantuan bagi para pencari suaka Rohingya yang mengungsi dan memastikan mereka mendapatkan makanan, penampungan, dan perlindungan yang memadai.
- Mengizinkan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi mendftar para pencari suaka di Bangladesh dan memberikan mereka kondisi penyambutan dengan layak.
- Menerima tawaran yang dibuat pemerintah luar negeri untuk tempat tinggal para pengungsi Rohingya yang sudah berada di kamp-kamp resmi..
- Memerintahkan segera Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) untuk menghentikan pengusiran perahu-perahu pencari suaka yang berlayar dari Burma atau mereka yang menyeberangi perbatasan melalui jalur darat.
- Mengizinkan akses pada media dan organisasi nonpemerintah lokal dan internasional, dan diplomat asing ke area tempat pencari suaka tiba.

Untuk pemerintah yang prihatin dengan kondisi Burma, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, negara anggota Uni Eropa, dan Jepang:

- Menekan pemerintah Burma mengizinkan pelapor khusus untuk melakukan penyelidikan independen tentang pelanggaran di Negara Bagian Arakan dan OHCHR mendirikan kantor di Burma dengan perlindungan, promosi, dan mandat bantuan teknis secara penuh, dan kantor cabang di negara-negara bagian di

- seluruh negeri, termasuk Negara Bagian Arakan. Menyediakan sumber memadai untuk memungkinkan pelapor khusus tentang Burma dan OHCHR dapat melaksanakan kegiatannya. Meminta misi diplomatik di Burma untuk dapat bepergian ke area-area konflik, termasuk wilayah tempat para pengungsi tinggal.
- Memberi dukungan bagi badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan nonpemerintah melayani bantuan di Negara Bagian Arakan dan di Bangladesh, serta mempromosikan secara terbuka akses bebas bagi badan-badan kemanusiaan dan pelayanan bantuan kemanusiaan bagi semua penduduk yang membutuhkan.
 - Mengirim sinyal jelas kepada pemerintah Burma bahwa penindasan brutal terhadap Rohingya dan minoritas lemah takkan bisa ditoleransi dan akan merusak hubungan mereka dan masyarakat internasional.
 - Mendukung upaya-upaya rekonsiliasi antara penduduk Arakan dan Rohingya di Negara Bagian Arakan, dan menekan secara terbuka dan pribadi kepada pemerintah Burma untuk menuntut diubahnya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang diskriminatif, menolak Rohingya di Burma mendapatkan hak-hak dan perlindungan warga negara.

Kepada Badan-badan PBB dan Komunitas Donor:

- Membuat staf dan sumber OHCHR tersedia untuk pelapor khusus tentang Burma bisa melaksanakan penyelidikan penuh terhadap kejadian kekerasan terbaru.
- Memastikan bantuan kemanusiaan dikirim dengan seimbang kepada semua penduduk yang membutuhkan di Negara Bagian Arakan; meningkatkan perhatian secara pribadi saat akses kemanusiaan dihambat ke penduduk Rohingya maupun Arakan.
- Memastikan semua penilaian di Negara Bagian Arakan termasuk tidak hanya komunitas yang terpapar konflik kekerasan sektarian tapi juga mereka yang menjadi korban penggeledahan dan pelanggaran brutal yang dilakukan aparat keamanan di seluruh Negara Bagian Arakan pada bulan Juni dan Juli.

Kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Donor lain:

- Menjamin semua proyek pembangunan ke depan di Negara Bagian Arakan menggandeng setiap individu yang menjadi korban kekerasan di kedua komunitas Rohingya dan Arakan.

- Menjamin semua projek pembangunan ke depan di Negara Bagian Arakan tidak mendiskriminasi Rohingya yang dilandasi ketentuan bahwa mereka tidak diakui warga negara Burma di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982.

Ucapan Terimakasih

Laporan ini diriset dan ditulis oleh Matthew F. Smith, konsultan Human Rights Watch, dan Tirana Hassan, peneliti urusan darurat. Penyuntingan dilakukan oleh Elaine Pearson, wakil direktur Asia, dan Brad Adams, direktur Asia. James Ross, direktur hukum dan kebijakan, dan Joseph Saunders, wakil direktur program, meninjau laporan lengkap. Sebagian laporan juga ditinjau oleh Bill Frelick, direktur Program Pengungsi, dan Jessica Evans, peneliti senior dalam Divisi Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Bantuan tata letak dan produksi dikerjakan Jake Scobey-Thal, *associate* Divisi Asia, Grace Choi, direktur publikasi, dan Ivy Shen, *associate* multimedia.

Ucapan terimakasih khusus untuk individu-individu dan organisasi yang membantu dalam penelitian dan yang dengan baik hati membagi waktu, energi, dan pengalamannya dengan Human Rights Watch. Human Rights Watch mengucapkan penghargaan terutama bagi korban dan saksimata dari Negara Bagian Arakan yang berbagi pengalamannya dengan kami.

Lampiran: Terjemahan Pamflet yang Menganjurkan untuk Pemisahan Komunitas

PENGUMUMAN KEPADA SEMUA WARGA RAKHINE (ARAKAN)

1. Rakhine tidak boleh melakukan bisnis¹³⁸ dengan orang Benggala¹³⁹
2. (Rakhine) tidak boleh berhubungan¹⁴⁰ dengan orang Benggala

Setiap orang memahami dan punya perasaan bahwa orang Benggal tinggal di tanah Rakhine, minum air Rakhine dan tidur di bawah bayangan Rakhine yang kini bekerja untuk memusnahkan Rakhine.

Karena itu untuk mencegah masalah (pemusnahan Rakhine), kami menyatakan semua warga Rakhine untuk ikuti instruksi yang kami sebutkan di atas.

Tertanda,
Kelompok Rahib Muda
Sittwe, Negara Bagian Rakhine

¹³⁸ ‘Membeli dan menjual dengan’ dalam bahasa Burma

¹³⁹ *Kalar* dipakai dalam dokumen asli. Secara umum istilah *Kalar* juga mengacu pada Indian. Di dokumen asli, *Kalar* secara khusus merujuk Benggala

¹⁴⁰ Tak boleh berhubungan atau berteman dengan